

**KEMITRAAN PEMERINTAH SWASTA
DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN
KETAHANAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI**

(Studi Pada Kemitraan PT. Pertani (Pesero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**REDY PUJA KESUMA
105030100111073**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

MOTTO

"What You Plant Now, You Will Harvest Later"

--- OG MANDINO ---

When we dream alone, it is just a dream

When we dream together, it is the beginning of reality

--- Brazilian Proverb ---



LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih banyak atas doa dan dukungan yang telah diberikan oleh kedua orangtua. Tanpa doa dan dukungan orang tua, skripsi ini tidak akan menjadi seperti saat ini. Penulis akan memberikan yang terbaik untuk ayah dan ibu tercinta.
2. Kepada kedua dosen pembimbing Bapak Imam Hanafi dan Ibu Trisnawati, terimakasih banyak atas arahan, bimbingan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan selama proses pembuatan hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar, Kakek, Nenek, Pak De, Bu De, Paman, Bibi serta Mbak Sindy dan Mas Andy yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Keluarga besar kost MT. Haryono 109, Kakek Pai, Bu Tunik, Mas Andre, Bu Soto, Bapak-bapak Bali S3, semua anak-anak kost, Ajib, Azis, Bayu, Chris, Dermon, Hara, Mawox, Ginting, Limbong, Pepen, Petrus, Rafles, Rian, Rio, Umam, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi keluarga selama empat tahun terakhir ini.
5. Seluruh teman-teman FIA publik khususnya angkatan 2010, teman-teman semester 1 kelas E, teman-teman magang, dan teman-teman UKM Tegazs UB yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak atas dukungan, doa, dan bantuan kalian semua.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kemitraan Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kemitraan PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Redy Puja Kesuma

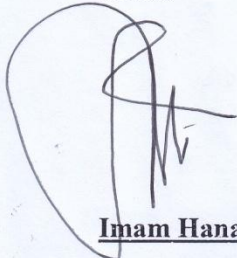
NIM : 105030100111073

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

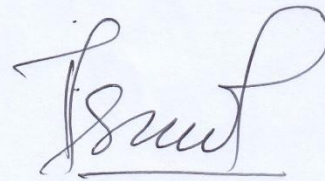
Konsentrasi : -

Malang, 20 Mei 2014

Komisi Pembimbing**Ketua**

Imam Hanafi, Dr. M.Si

NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota

Trisnawati, S.Sos, MAP

NIP. 19800307 200801 2 012

TANDA PENGESAHAN

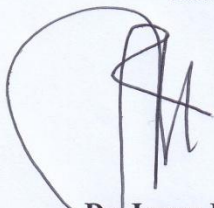
Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juni 2014
Jam : 12.00 WIB
Skripsi atas nama : Redy Puja Kesuma
Judul : Kemitraan Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kemitraan PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

dan dinyatakan lulus

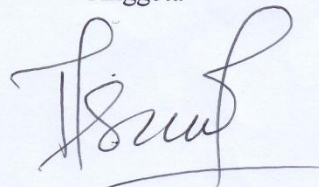
MAJELIS PENGUJI

Ketua



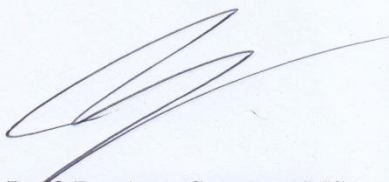
Dr. Imam Hanafi, MS, M.Si
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota



Trisnawati, S.Sos, MAP
NIP. 19800307 200801 2 012

Anggota



Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota



Dr. Abdullah Said, M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat2 dan pasal 70)

Malang, 20 Mei 2014



Redy Puja Kesuma
105030100111073

RINGKASAN

Redy Puja Kesuma, 2014, **Kemitraan Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kemitraan PT. Pertani (Pesero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)**. Dosen Pembimbing: Imam Hanafi, Dr, M.Si, Trisnawati, S.Sos, MAP, 148 hal + xix

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, namun kesejahteraan petani di Indonesia bisa dibilang masih jauh dari harapan. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa sumber kemiskinan terbesar disumbangkan oleh masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Selain masalah kesejahteraan petani, masalah krisis ketahanan pangan nasional juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan, mengingat impor bahan pangan dari luar negeri sudah tidak bisa terelakkan lagi. Untuk itulah pemerintah melalui Kementrian BUMN mengeluarkan solusi program yaitu Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Program GP3K merupakan suatu bentuk implementasi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai tanggung jawab sosial BUMN sektor pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemitraan yang terjalin antara Pemerintah melalui Dinas Pertanian khususnya Petugas Penyuluh Lapangan dan Aparatur Terkait, PT. Pertani (Persero) selaku BUMN sektor pertanian dan petani mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait dengan implementasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah kemitraan antar aktor pelaksana, terkait implementasi Program GP3K yang meliputi bentuk kemitraan, peran aktor pelaksana, implementasi program, *output* yang dihasilkan, serta faktor pendukung dan penghambat dari program kemitraan tersebut. Data yang digunakan penulis diperoleh dari bagian administrasi PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang dan melakukan observasi atau wawancara serta studi dokumentasi pada masyarakat sebagai petani mitra dan aparatur terkait di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data yang diperoleh dikumpulkan,

dinterpretasi, serta dianalisa kemudian diuraikan secara rinci untuk mengetahui permasalahan dan mencari penjelasannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa kemitraan yang terjalin antara pemerintah, BUMN pelaksana dan masyarakat melalui Program kemitraan GP3K di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang telah memberikan berbagai dampak positif. Dengan adanya program kemitraan GP3K ini, banyak manfaat yang diperoleh oleh setiap aktor pelaksana, mulai dari petani dengan meningkatnya kesejahteraan melalui produksi pertanian yang bertambah, PT. Pertani (Persero) dengan keuntungan penjualan yang meningkat, hingga pemerintah karena terpenuhinya pasokan pangan nasional serta tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun disamping keberhasilan program GP3K ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap aktor pelaksana agar implementasi Program Kemitraan GP3K khususnya di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dapat berjalan lebih baik lagi, persoalan tersebut meliputi kurangnya jumlah petugas penyuluh lapangan dari PT. Pertani (Persero) dan PPL Dinas Pertanian, tingginya harga sarana produksi pertanian yang ditawarkan kepada petani, pengendalian hama serta faktor alam yang dapat menghambat proses usaha tani, hingga masalah pengembalian biaya garap oleh petani yang sering terlambat. Sehingga dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran diantaranya melalui penambahan jumlah petugas penyuluh lapangan, baik dari pihak PT. Pertani maupun Dinas Pertanian, peningkatan kualitas pembibingan dari aparat desa melalui Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Kaur bidang pertanian dan irigasi, serta peningkatan partisipasi dari tiap-tiap kelompok tani khususnya dalam mengelola usaha tani dan implementasi Program GP3K.

Kata Kunci : Program Kemitraan Bina Lingkungan, Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi, Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

SUMMARY

Redy Puja Kesuma, 2014, **Partnership of Government Privat and Society in Realize Food Security and Farmer Welfare (Studies in PT. Pertani (Persero) and Farmers Partnership at Village Tulungrejo Ngantang Malang).** Lecturer: Imam Hanafi, Dr, M.Si, Trisnawati, S. Sos, MAP, 148 + xix

Indonesia is an agricultural country, where most of the population livelihood as farmers, but the welfare of farmers in Indonesia practically still far from expectations. Central Bureau of Statistics said if the largest source of poverty donated by the majority of rural people livelihood as farmers. Besides the issue of the welfare of farmers, national food security crisis issue also be aspects that need to be considered, given the import of foodstuffs from abroad can no longer inevitable. For that the government through the Ministry of State Enterprises Movement issued a programmatic solution is based Food Production Improvement Corporation (GP3K). GP3K program is a form of implementation of the Community Development Partnership Program (CSR) as an SOE social responsibility agricultural sector in order to improve national food security and livelihoods. The purpose of this study was to determine how the partnership that exists between the Government through the Department of Agriculture extension agents and particularly Related Apparatus, PT. Pertani (Persero) as the SOE sector partners agriculture and farmers in the village of Tulungrejo Ngantang Malang associated with the implementation of the Program Improvement Movement Based Food Production Corporation (GP3K).

In this study the authors used qualitative methods with a descriptive approach. While the focus in this study is a partnership between actors executing, related implementation GP3K program that includes partnerships, the role of the implementing actors, program implementation, the resulting output, as well as supporting and inhibiting factors of the partnership program. Authors used data obtained from the administration of PT. Pertani (Persero) Malang and Marketing Branch observations or interviews and documentation study on the community as a farmer partners and the involved parties in the Village Tulungrejo Ngantang Malang. Data used in this study is primary data and secondary data. The data obtained were collected, range of interpretation, and then described in detail analyzed to determine the problems and seek an explanation.

Based on the research that has been done, the result that the partnership that exists between the government, state enterprises and communities through implementing a GP3K partnership program in the Village Tulungrejo Ngantang Malang has various positive effects. Given this GP3K partnership program, many benefits gained by each actor executor, ranging from farmers to increased welfare through increased agricultural production, PT. Pertani (Persero) with sales increasing profits, to the government for the fulfillment of the national food supply as well as the achievement of the set targets. But despite the success of this GP3K program, there are several things that must be considered by every actor executing that program implementation, especially in the Village Tulungrejo Ngantang Malang Regency could have gone better, these problems include the lack of the number of extension workers from PT. Pertani (Persero) and the Department of Agriculture, the high prices of agricultural inputs are offered to farmers, pest control and natural factors that can hinders the process of farming, to refund the cost of work on the problem by farmers is often too late. So the conclusion of the authors provide several suggestions, including through increasing the number of extension workers, both from the PT. Pertani (Persero) and Department of Agriculture, guiding quality improvement of village officials through farmers group Chairman, chief agriculture and irrigation, as well as increased participation of each group of farmers, especially in managing the implementation of farming and GP3K Program.

Keywords : Community Development Partnership Program, Improvement Movement Corporations Based Food Production Program, Food Security and Welfare of Farmers

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kemitraan Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kemitraan PT. Pertani (Pesero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Choirul Saleh, Dr, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Imam Hanafi, Dr, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, nasehat dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tahapan skripsi ini.
4. Ibu Trisnawati, S.Sos, MAP selaku Dosen Pembimbing II yang selalu mengarahkan dan memberi ilmunya kepada penulis guna penyelesaian karya tulis skripsi ini.
5. Para dosen dan staff karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam segala hal.
6. Seluruh staff dan karyawan PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang yang sudah berkenan memberikan tempat, ilmu, informasi, serta data yang dibutuhkan selama penelitian ini berlangsung.

7. Seluruh aparat Desa Tulungrejo dan aparat Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti.
8. Seluruh Pengurus dan anggota Kelompok Tani Rukun Makmur III Desa Tulungrejo yang sudah banyak membantu peneliti dalam pengumpulan data di lapangan.
9. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, 20 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Governance	11

1. Pengertian <i>Governance</i>	11
2. <i>Good Governance</i>	13
3. Aktor <i>Governance</i>	15
4. Unsur-unsur dan Prinsip <i>Good Governance</i>	19
B. Kemitraan	22
1. Pengertian Kemitraan	22
2. Prinsip dan Model Kemitraan	24
3. Tantangan dan Hambatan dalam Kemitraan.....	28
C. Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)	29
1. Pengertian PKBL.....	29
2. Konsep Program GP3K	31
D. Pembangunan Pertanian	33
1. Pengertian Pembangunan Pertanian	33
2. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Kemitraan Usaha.....	34
3. Pembangunan Pertanian di Indonesia.....	36
E. Ketahanan Pangan	38
1. Pengertian Ketahanan Pangan	38
2. Tujuan Ketahanan Pangan	41
F. Kesejahteraan Petani	42
1. Kesejahteraan Petani di Indonesia.....	42
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	48
B. Fokus Penelitian	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Teknik Analisis Data	56
H. Keabsahan Data.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang	62
a. Kondisi Geografis	62
b. Keadaan Topografi	64
c. Keadaan Demografi	65
d. Potensi Pertanian Kabupaten Malang	66
2. Gambaran Umum Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang	67
a. Kondisi Geografis	67
b. Keadaan Demografi	69
c. Pendidikan	70
d. Kesehatan	72
e. Mata Pencaharian	73
3. Gambaran Umum PT. Pertani (Persero)	74
a. Sejarah Pendirian	74
b. Visi Misi	76
c. Tujuan Perusahaan	79
d. Strktur Organisasi	81
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	85
1. Kemitraan Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Terkait Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)	85
a. Bentuk Kemitraan	85
b. Peran Aktor Pelaksana	91
c. Implementasi Program	98
d. <i>Output</i> Kemitraan	102
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kemitraan antara Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Terkait Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)	103
a. Faktor Pendukung	103
b. Faktor Penghambat	108
C. Analisis dan Pembahasan	114
1. Kemitraan Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Terkait Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)	114
a. Bentuk Kemitraan	114

b. Peran Aktor Pelaksana	117
c. Implementasi Program	123
d. <i>Output</i> Kemitraan	127
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kemitraan antara Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Terkait Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)	
a. Faktor Pendukung	131
b. Faktor Penghambat	135

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	140
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA	146
-----------------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Malang	66
2. Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Tulungrejo Berdasarkan Usia	70
3. Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tulungrejo	71
4. Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	74
5. Tabel 5. Daftar Kelompok Tani Desa Tulungrejo	100
6. Tabel 6. Rencana Paket Saprodi Kemitraan	108



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data	59
2. Gambar 2. Peta Kabupaten Malang.....	64
3. Gambar 3. Peta Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang	68
4. Gambar 4. Logo PT. Pertani (Persero)	77
5. Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi PT. Pertani Malang.....	85
6. Gambar 6. Alur Bisnis Program kemitraan PT. Pertani (Persero)	89



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Interview Guide
2. Lampiran 2. Dokumentasi Terkait Penelitian yang dilakukan
3. Lampiran 3. Surat Izin Melaksanakan Penelitian
4. Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
5. Lampiran 5. RDKK Kelompok Tani Rukun Makmur III Desa Tulungrejo
6. Lampiran 6. Dokumen Pengajuan Program GP3K Kelompok Tani Rukun Makmur III Desa Tulungrejo
7. Lampiran 7. Brosur Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)
8. Lampiran 8. Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani, namun kesejahteraan petani di Indonesia bisa dibilang masih jauh dari harapan, bahkan sebanyak 55,33% petani di Indonesia merupakan petani gurem atau yang memiliki lahan tidak lebih dari setengah hektare (Data Sensus Pertanian, 2013). Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sebagian besar disumbangkan oleh petani khususnya yang berada di pedesaan, karena dari 28,07 juta penduduk miskin pada bulan Maret 2013, sebanyak 17,74 jutanya merupakan penduduk pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai petani atau buruh tani (BPS, 2013). Hal tersebut tentu menjadi sebuah ironi karena petani memiliki peranan yang sangat penting sebagai penyedia pangan nasional.

Pemerintah sebagai *stakeholder* tentu sudah berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya dengan mengeluarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani. Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan dapat mempermudah kinerja petani yang selama ini menjadi hambatan, seperti masalah permodalan, kredit perbankan, hingga adanya

jaminan-jaminan mulai dari ketersediaan lahan, intensif, dan jaminan jika terjadi gagal panen. (Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2013)

Selain masalah kesejahteraan petani, dalam beberapa tahun terakhir masalah krisis ketahanan pangan nasional juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan, mengingat impor bahan pangan dari luar negeri sudah tidak bisa terelakkan lagi. Padahal dalam Penjelasan Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 secara jelas mengungkapkan bahwa “pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri”, hal tersebut tentu perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta terwujudnya ketahanan pangan nasional tanpa harus bergantung dari negara lain. Apalagi seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara yang luas dan kaya akan potensi-potensi sumber daya alam termasuk potensi pertanian yang dapat di maksimalkan untuk memenuhi pasokan pangan dalam negeri tanpa harus mengandalkan impor bahan pangan dari luar. Namun disamping adanya kelebihan potensi sumber daya alam tersebut, terdapat pula faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya krisis ketahanan pangan di Indonesia, seperti yang dikemukakan Darmawan (2012:22), yakni anomali cuaca yang berkepanjangan, jumlah penduduk yang terus bertambah, peningkatan perekonomian yang tidak sebanding dengan pertumbuhan komoditas pangan, dan penggunaan komoditas pangan untuk bahan bakar.

Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan maupun kesejahteraan petani seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah melalui Kementrian BUMN

mengeluarkan sebuah solusi program dalam bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat yang mulai digulirkan pada bulan Juni 2011, program tersebut adalah Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Kemunculan Program GP3K tidak terlepas dari tujuan pemerintah dalam hal peningkatan ketahanan pangan melalui target Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 yang ditempuh melalui dua strategi, yaitu peningkatan produksi dan penurunan konsumsi beras. Dalam rangka peningkatan produksi, strategi yang ditempuh adalah peningkatan produktivitas, perluasan areal dan pengelolaan lahan, serta penurunan konsumsi beras dalam rangka diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Program GP3K inilah yang kemudian dipilih pemerintah sebagai salah satu solusi program untuk peningkatan produksi pangan dalam negeri. (Prasticha, 2013:3)

Pada dasarnya Program GP3K merupakan kegiatan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kelompok tani binaan dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Program GP3K sendiri merupakan suatu bentuk tanggung jawab BUMN sektor pertanian kepada masyarakat dalam bentuk Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Menurut Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat, secara konsep PKBL yang dilaksanakan BUMN ini

tidak jauh berbeda dengan praktek *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

Menurut Darmawan (2012:22) awal kemunculan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang dihadapi petani sebagai berikut:

“Pertama kecenderungan produktivitas petani Indonesia yang belum maksimal, dimana lahan pertanian yang seharusnya dapat menghasilkan 5 ton per hektare, masih belum dapat terwujud, kedua kesulitan akses pembiayaan khususnya dalam kredit perbankan bagi petani, dan ketiga petani masih kesulitan dalam mendapatkan sarana produksi ditambah lagi dengan kesulitan dalam proses pemasaran hasil produksi, sehingga pada saat panen raya harganya justru jatuh”.

Dengan adanya program GP3K tersebut, sinergi yang baik antaraktor *governance* dalam hal ini pemerintah dan masyarakat yang diwakilkan oleh BUMN sektor pertanian dan petani mitra sangat dibutuhkan.

Keberadaan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 jelas dituntut untuk mampu memenuhi pasokan pangan nasional, dimana tertulis bahwa “negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah”, serta dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, pemerintah juga dituntut untuk dapat merealisasikan kesejahteraan petani, hal tersebut juga sesuai dengan amanah konstitusi dimana tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Djajanto

(2011:9) “Program GP3K merupakan suatu upaya untuk melibatkan dunia korporasi dalam mempersiapkan program ketahanan pangan, dimana masalah ketahanan pangan bukan selamanya didominasi pemerintah, namun melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah”. Adanya sinergi tersebut tentu tidak terlepas dari konsep *Good Governance* dimana *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan bahwa *Good Governance* merupakan hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara (*State*) sektor swasta (*Private Sector*) dan masyarakat (*Society*). Oleh karena itu, sinergi yang baik dari semua aktor *governance* sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program kemitraan GP3K, mulai dari pemerintah pusat dan daerah melalui Dinas Pertanian, BUMN pelaksana, hingga masyarakat dalam hal ini petani mitra.

Salah satu BUMN yang melakukan program ini adalah PT. Pertani (Persero). Melalui GP3K diharapkan adanya hubungan saling menguntungkan dimana PT. Pertani (Persero) memberikan kemudahan berupa pinjaman modal (pembiayaan) dan paket sarana produksi pertanian, teknologi budidaya, teknologi pasca panen dan menjamin pemasaran hasil produksi dari program kemitraan. Sedangkan petani akan melaksanakan program budidaya penanaman sesuai yang direkomendasikan dengan menggunakan paket sarana produksi dari PT. Pertani (Persero) dan akan menjamin pinjaman atas sarana produksi tersebut dengan hasil panennya. Pola kemitraan ini diharapkan menunjang pembangunan di sektor pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. (Prasticha, 2013:3)

Dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat kemitraan yang terjalin antara PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang sebagai perusahaan BUMN sektor pertanian dan petani mitra di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang usaha pengelolaan lahan, tanam, benih, pupuk organik dan non organik, penggilingan padi, hingga resi gudang, PT. Pertani (Persero) tentu memiliki peranan penting dalam merealisasikan program GP3K yang telah dicanangkan pemerintah. Di Kabupaten Malang sendiri PT. Pertani sudah menjalankan program tersebut, dan hingga medium 2013 sudah bermitra dengan kurang lebih 57 kelompok tani di seluruh Kecamatan di Kabupaten Malang (PT. Pertani, 2013). Sementara itu, Kecamatan Ngantang yang memiliki lahan pertanian cukup luas di Kabupaten Malang merupakan basis mitra PT. Pertani Cabang Pemasaran Malang yang cukup banyak, dimana terdapat keseluruhan 13 Desa yang mayoritas penduduknya merupakan petani, termasuk Desa Tulungrejo.

Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana kemitraan yang terjalin antara PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang dan petani mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait dengan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tersebut demi tercapainya tujuan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani berdasarkan Undang-undang tentang Pangan No. 18 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 19

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, sehingga dari latar belakang diatas penulis mengangkat judul **“Kemitraan Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kemitraan PT. Pertani (Pesero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk kemitraan yang terjalin antara PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang terkait dengan implementasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)?
2. Apasajakahkah faktor pendukung dan penghambat yang muncul dari kemitraan antara PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk kemitraan yang terjalin antara PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang terkait dengan implementasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).

2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul dari kemitraan antara PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat secara akademik maupun paraktis bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Secara umum manfaat yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat Akademik
 - a. *Output* dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai kemitraan yang terjalin antara Pemerintah melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan aparatur terkait, PT. Pertani (Persero) selaku BUMN sektor pertanian dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
 - b. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah, BUMN sektor pertanian dan Petani Mitra.
 - c. Diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang kemitraan antara Pemerintah, BUMN sektor pertanian dan Petani Mitra.

- d. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti yang selanjutnya dalam tema yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti: untuk mengembangkan sikap kritis peneliti terhadap kemitraan yang terjalin antara Pemerintah, PT. Pertani (Persero) selaku BUMN sektor pertanian dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
 - b. Bagi Pemerintah melalui PPL Dinas Pertanian dan aparaturnya terkait, serta PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang: Output dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan berupa faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kerjasama khususnya dalam implementasi program GP3K agar pembangunan pertanian dapat berjalan lebih baik lagi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama melakukan penulisan dan penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang direncanakan adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pembahasan tersebut meliputi: teori *governance*, kemitraan, program kemitraan bina lingkungan, pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan tentang metode penelitian yang digunakan, fokus penelitian, penentuan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini secara garis besar mencakup deskripsi atau gambaran umum mengenai obyek penelitian, analisis dan interpretasi data yang diawali dengan penyajian dan selanjutnya akan diuraikan dan dibahas analisis masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang ditemukan berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan berisi tentang temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian. Saran merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Governance

1. Pengertian Governance

Seiring dengan berjalanya waktu, penyelenggaraan kehidupan bernegara juga mengalami perubahan. Pola tata pemerintahan yang lama kini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari pola penyelenggaraan pemerintah yang dahulu *state centered*, dimana pemerintah bertindak sebagai aktor kunci kehidupan kini berubah menjadi *society centered*, dimana pemerintah memberikan peluang kepada warganya untuk turut andil dalam berbagai kegiatan bernegara. Luthfi (2013:12)

Pada saat ini, orientasi penyeleggaraan pemerintah telah berubah menuju kepada pelayanan publik. Artinya, pemerintah memiliki tugas yang sangat berat untuk memenuhi kebutuhan warganya. Dengan demikian, pemerintah perlu membuka diri serta melibatkan aktor eksternal guna menjalankan program pelayanan yang diembanya. Pada umumnya pihak eksternal tersebut adalah masyarakat madani (*civil society*) dan sektor swasta (*private*) seperti yang ada pada konsep *Governance*. Dengan adanya keterlibatan aktor-aktor terebutlah konsep *Government* (pemerintahan) dengan *Governance* (tata pemerintahan) dapat dengan mudah untuk dibedakan. Luthfi (2013:12)

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa inggris diartikan sebagai “*the authoritative direction and administration of the affairs of man/woman in nations, state, city, etc.*” atau yang dalam bahasa Indonesia berarti “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian atau kota, dan sebagainya”. Sedangkan *Governance* Menurut Sumarto (dalam Luthfi:12) dapat diartikan sebagai mekanisme, praktik dan warga mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Basuki (2006:8) menyatakan bahwa *Governance* adalah Pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatan dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial. Sedangkan Sjamsuddin (2006:6) mengartikan bahwa *Governance* adalah “Pemerintahan yang merujuk pada proses, yaitu proses penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dengan melibatkan bukan saja negara tapi juga semua *stakeholder* yang ada, baik itu dunia usaha dengan kelompok pengusahnya yang kuat, sampai pada kelompok termiskin dalam masyarakat”. Sjamsuddin juga mempertegas bahwa *Governance* adalah proses lembaga pemerintahan, bisnis (sektor swasta), dan kelompok warga dalam mengungkapkan kepentingan, melaksanakan hak dan kewajiban, dan menengahi perbedaan mereka.

Dengan demikian dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang dominan karena masih ada aktor-aktor lain yang ikut terlibat. Hal tersebut diperlukan guna menghindari penguasaan atau

“eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Sehingga, hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling mengontrol (*check and balances*). Berdasarkan uraian diatas maka *Governance* dapat dimaknai sebagai interaksi atau sinergi antara berbagai aktor dalam pemerintahan negara, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pada konteks ini, pemerintah adalah aktor yang mempunyai kapasitas memadai untuk menggerakkan masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan kesejahteraan berbangsa dan bernegara khususnya dalam pelayanan publik.

2. *Good Governance*

Dalam penyelenggaraan suatu program pemerintah diperlukan adanya suatu tata pemerintah yang baik agar dalam pelaksanaan program-program yang diselenggarakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Sedarmayanti, 2009:272). *Government* sebagai terjemahan dari pemerintah, kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktek terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (*Good Governance*). OECD dan World Bank yang dikutip oleh Sedarmayanti (2009:273) mengartikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan menurut Rochman dalam Sedarmayanti (2009:277) *Good Governance*

adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil (dengan syarat utama efisien) serta relatif merata.

Selanjutnya, pengertian *Good Governance* menurut Sekretariat *Partnership for Governance* yang dikutip Sjamsuddin (2006:11) menyatakan bahwa “Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta”. Sementara itu *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan *Good Governance* sebagai “Hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara (*State*) sektor swasta (*Private Sector*) dan masyarakat (*Society*). Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa “Wujud *Good Governnance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat” (Sjamsuddin, 2006:11).

Salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta dan sektor masyarakat madani yaitu:

- a. Pengaturan didalam sektor publik, antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara badan eksekutif yaitu presiden beserta pelaksana pemerintah, legislatif yaitu DPR dan MPR, serta yudikatif yaitu lembaga peradilan atau pengadilan. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah.
- b. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multinasional koperasi dan sebagainya.

- c. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olahraga, kelompok kesenian, dan sebagainya. (Sedarmayanti, 2009:279-280)

Dengan demikian, pada dasarnya unsur-unsur dalam pemerintahan (*Governance Stakeholder*) dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Negara/pemerintahan: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial politik dan ekonomi (Sedarmayanti, 2009:280)

Dalam paradigma *rule government* penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulannya adalah prinsip pemerintahan yang baik tidak hanya terbatas pada pengguna peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah/negara semata, tetapi melibatkan internal birokrasi dan eksternal birokrasi.

3. Aktor *Governance*

Dalam pelaksanaanya, *Good Governance* perlu melibatkan banyak aktor sebagai stakeholder yang terdiri dari beberapa aktor sebagai berikut:

- a. Warga negara (sebagai individu)
Individu dalam sebuah negara menkombinasikan barang/jasa privat dan barang/jasa publik dalam rangka memaksimalakan kesejahteraanya. Tidak

semua kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi oleh perusahaan dan pemerintah, seperti persahabatan, kasih sayang, donor darah dan kebutuhan-kebutuhan ideologi ataupun rohani. Karena itu, mereka membutuhkan lembaga nirlaba, seperti kelompok-kelompok hobi, kelompok-kelompok keagamaan, dll.

- b. Organisasi formal dan informal masyarakat lokal
Hadirnya organisasi-organisasi formal dan informal pada tingkat masyarakat lokal bukanlah gejala aneh. Dalam konteks Indonesia kelompok ikatan-ikatan persaudaraan, arisan, organisasi budaya lokal senantiasa muncul.
- c. Organisasi nirlaba
Organisasi-organisasi nirlaba umumnya didirikan atas motivasi kemanusiaan, baik dalam bentuk organisasi keagamaan dan organisasi sosial. Sekalipun organisasi ini tidak berorientasi laba, namun mereka tetap memperjuangkan manfaat sosial bagi para anggotanya.
- d. Dunia usaha
Motivasi pendirian perusahaan adalah memaksimalkan laba atau dalam kehidupan nyata memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dunia usaha sangat membutuhkan kepastian.
- e. Media
Media khususnya surat kabar, radio, dan televisi mempunyai peran penting dan strategis. Melalui merekalah kebijakan-kebijakan pemerintah diinformasikan kepada masyarakat. Melalui media jugalah evaluasi formal dan informal tentang kinerja pemerintah disampaikan. Media juga merupakan alat kontrol yang efektif untuk menjaga perilaku pejabat-pejabat publik.
- f. Lembaga-lembaga pemerintah
Lembaga-lembaga pemerintah dalam arti luas (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif), maupun dalam arti spesifik (Eksekutif dan birokrasi pemerintah), mempunyai peranan yang penting dan sentral dalam kehidupan modern. Mereka melalui provisi dan atau memproduksi barang publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- g. Politisi-politisi terpilih
Secara teoritis tugas politisi terpilih adalah memperjuangkan tujuan para konstituenya. Para politisi yang menang dalam pemilu akan masuk dalam sistem tata kelola sebagai anggota lembaga legislatif. Pada posisi ini, tugas mereka adalah mengawasi agar implementasi kebijakan akan menyenangkan para konstituen dan tidak bertentangan secara prinsipil dengan kepentingan nasional. Tjiptoherijanto (dalam Luthfi 2013:15)

Sementara itu, Sjamsuddin (2006:24-27) menyatakan, unsur-unsur *stakeholder governance* meliputi individual, organisasi, institusi, dan kelompok sosial

yang keberadaanya sangat penting bagi terciptanya tata pemerintahan yang efektif.

Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu:

a. Negara (*State*)

Pengertian negara/pemerintahan (*State*) dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peranan dan tanggung jawab negara atau pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah, dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional dan global.

b. Sektor swasta (*Privat sector*)

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti: industri pengolahan (*manufacturing*), perdagangan, dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena peranya sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi.

c. Masyarakat madani (*Civil society*)

Masyarakat madani meliputi perseorangan dan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Masyarakat madani tidak hanya melakukan *check and balances* terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta tetapi juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur lain, seperti membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi, dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Sedarmayanti (2009) dimana dalam upaya membangun masyarakat madani, partisipasi dan pelaksanaan *good governance*, terdapat tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing dalam tata pengelolaan pemerintahan yang baik, yakni negara (*state*), pihak swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*). Negara sebagai salah satu unsur *governance* didalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang

dan sektor informal lain di pasar. Adanya anggapan bahwa sektor swasta merupakan bagian dari masyarakat. Namun sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena mempunyai pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun non formal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain-lain.

Good governance akan lebih berfungsi dengan baik apabila ketiga *stakeholder*, yakni negara, swasta, dan masyarakat madani dapat saling bersinergi. Menurut Sedarmayanti (2009:307) meskipun pelaku *good governance* memiliki ideologi yang berbeda, dimana ideologi negara adalah kekuasaan, ideologi swasta adalah kapital (modal), dan ideologi masyarakat madani adalah demokrasi dan kebebasan, tetapi ketiga pihak tersebut harus bisa berkolaborasi bukan hanya untuk mencapai tujuan masing-masing, melainkan untuk mencapai tujuan lebih tinggi, tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Setiap pelaku *good governance* memiliki peran dan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara, yaitu:

- a. Negaraberperan menciptakan lingkungan politik hukum kondusif, dimana negara berperan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, dan membangun politik kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasionalserta global
- b. Sektor swasta berperan menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peran sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena peranya sebagai sumber peluang meningkatkan produktivitasnya, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

- c. Masyarakat madani berperan dalam memfasilitasi interaksi sosial dan politik, menggerakkan kelompok masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. (Sedarmayanti, 2009:307)

Dari ketiga domain *governance* diatas, dapat dilihat bahwa domain *state* menjadi domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan *good governance*, karena fungsi dari peraturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar, sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya perwujudan *good governance* dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga *good governance* dapat terwujud. (Sedarmayanti, 2009:281)

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan *good governance*, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek pemerintah. Tetapi masyarakat lebih berperan sebagai subyek yang ikut serta dalam mewarnai program-program dan kebijakan pemerintah.

4. Unsur-unsur dan Prinsip *Good Governance*

Lembaga Administrasi Negara (LAN) (dalam Basuki, 2006:9), mengemukakan bahwa *Good Governance* memiliki dua orientasi, yang pertama, orientasi ideal negara diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, yaitu demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituenya seperti *legitimacy*

,*accountability securing of human rights, autonomy and devolution of power and assurance*. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu pemerintahan yang berjalan secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Adapun unsur-unsur utama yang terdapat dalam *Good Governance*, menurut Ganie

Rochman dan Bhatta (dalam Sjamsuddin, 2006:50-52) ada empat yaitu:

- a. Akuntabilitas
Yaitu kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.
- b. Transparansi
Transparansi lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.
- c. Keterbukaan
Keterbukaan mengacu kepada terbentuknya kesepakatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. Kerangka hukum
Kerangka hukum diartikan bahwa adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan harus selalu diluruskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah ditetapkan dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasi.

Sedangkan dalam upaya standarisasi pelaksanaan *good governance* di seluruh negara di dunia, UNDP yang dikutip Basuki (dalam Luthfi, 2013:18) mensyaratkan prinsip-prinsip penyelenggaraan *Good Governance* sebagai berikut:

- a. Partisipasi
Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Penegakan hukum

Mewujudkan adanya penegak hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM, dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

- c. **Transparansi**
Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. **Kesetaraan**
Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- e. **Daya tanggap**
Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali.
- f. **Wawasan kedepan**
Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas serta mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
- g. **Akuntabilitas**
Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- h. **Pengawasan**
Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat.
- i. **Efisiensi dan efektivitas**
Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- j. **Profesionalisme**
Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

Prinsip dasar yang membedakan antara konsepsi tata pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan (*government*) adalah yang pertama menekankan pada peningkatan peran masyarakat (termasuk dunia usaha, dan organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat) dalam memajukan kehidupan. Sedangkan yang kedua mengurangi peran pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap kebebasan masyarakat.

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Sulistyani (dalam Marsiatanti, 2011:51) kemitraan ditinjau dari prespektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner* yang memiliki terjemahan pasangan, jodoh, sekutu atau komponen, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai kerjasama antara pemerintah melalui BUMN sektor pertanian dengan petani dalam rangka usaha mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui program GP3K. Bertolak dari pengertian diatas maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih;
- b. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan;
- c. Ada kesepakatan;
- d. Saling membutuhkan;

Selanjutnya, Hafsah (2000) dalam Maulidiah melalui situs <http://jurnal-online.um.ac.id>, menyatakan bahwa kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan

prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang disertai adanya satu pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain dan sebaliknya. Kemitraan merupakan suatu konsep yang memadukan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi. Adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan juga akan menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Pemahaman dan penerapan etika bisnis yang kuat akan memperkuat pondasi kemitraan yang akan memudahkan pelaksanaan kemitraan itu sendiri (<http://jurnal-online.um.ac.id>)

Selanjutnya, Martodireso dan Suryanto (dalam Prasticha, 2013) menjelaskan bahwa kemitraan dalam usaha pertanian dimaknai sebagai “salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan saling menguntungkan dan saling memperkuat. Saling menguntungkan berarti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani memerlukan penampungan hasil dan bimbingan. Saling menguntungkan berarti pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan dan keuntungan disamping adanya kesinambungan usaha. Saling

memperkuat berarti petani dan pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak, dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Kemitraan dapat dilakukan oleh semua pihak, baik perseorangan ataupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra dapat memiliki status setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan visi misi yang berbeda namun saling melengkapi secara fungsional. Hal tersebut tentu saja sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama khususnya dalam sinergi kemitraan di sektor pertanian ini.

2. Prinsip dan Model Kemitraan

Menurut Adi Candra (dalam Marsiatanti, 2011:53) hubungan kemitraan antara beberapa pihak akan terjalin erat dan saling menguntungkan jika pihak-pihak tersebut memegang teguh prinsip-prinsip kemitraan yang mendukungnya, seperti:

- a. Saling percaya dan menghormati
Kemitraan yang terbangun secara kelembagaan pada dasarnya dimulai oleh adanya kebutuhan satu pihak terhadap eksistensi dan peran pihak lain, atau kebutuhan semua pihak yang terlibat untuk bekerjasama mencapai sebuah tujuan yang menjadi kepentingan bersama. Mengingat posisi dan peranya yang sangat penting secara kelembagaan, kemitraan tidak akan terjadi di antara pihak-pihak yang sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain sehingga sampai kondisi yang paling tinggi, yaitu saling percaya dan penghormatan inilah, pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kemitraan akan dengan mudah melakukan kerjasama melalui praksis berbagai peran, tugas, kewenangan, dan juga melibatkan pertukaran sumber daya.
- b. Otonomi dan kedaulatan

Salah satu komponen penting yang menjadi penyusunan bangunan kemitraan secara kelembagaan adalah penghargaan atas otonomi kelembagaan. Dengan prinsip itu pula, sebuah hubungan kemitraan selayaknya dibangun dan dijalankan melalui kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Prinsip kedua ini secara logis merupakan implikasi dari adanya prinsip yang pertama. Dengan adanya prinsip saling percaya dan menghormati, pihak-pihak yang membangun kemitraan akan dengan sendirinya memahami dan menghargai eksistensi masing-masing pihak tanpa perlu mencampuri satu terhadap yang lain.

c. Saling mengisi

Kemitraan dalam pengertian sebagai “interaksi” yang melibatkan sejumlah pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati menghajatkan adanya “pertukaran”. Pada pemahaman tersebut, kemitraan sejatinya bertitik tolak atas kesadaran terhadap “keterbatasan” lembaga dan sekaligus melihat adanya “kelebihan” pada pihak lain yang diharapkan dapat menutupinya. Dengan demikian, kemitraan secara kelembagaan dibangun berdasarkan prinsip saling mengisi pada semua aspek yang diperlukan untuk itu, sehingga diperoleh pencapaian yang lebih besar dan bermakna pada pengertiannya yang lebih luas.

d. Keterbukaan dan pertanggungjawaban

Meskipun kemitraan dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip saling percaya, bukan berarti pihak-pihak yang terlibat didalamnya terlepas dari kecenderungan untuk menyelewengkan terhadap posisi dan peran yang dijalankannya. Untuk maksud menjamin berjalanya kemitraan sesuai dengan maksud dan tujuannya, diperlukan adanya prinsip keterbukaan yang memungkinkan semua pihak yang terlibat dapat mengetahui dengan mudah komitmen dan kinerja masing-masing pihak terhadap kesepakatan yang dibangun bersama. Sedangkan dalam rangka menjamin pemenuhan terhadap pencapaian maksud dan tujuan kemitraan, diperlukan adanya prinsip pertanggungjawaban terhadap semua pelaksanaan ya pada tataran praktis. Berjalanya kedua prinsip tersebut di atas akan menjadikan kemitraan menjadi pilihan rasional dalam menjalankan relasi kelembagaan yang sehat dan positif.

Selanjutnya, Sulistiyani (2004:130) menjelaskan model dari kemitraan yang dikembangkan berdasarkan dunia organisme, yaitu:

a. *Pseudo partnership* (kemitraan semu)

Kemitraan semu adalah sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara berimbang satu dengan lainnya. Bahkan satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting

untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

b. *Mutualism partnership* (kemitraan mutualistik)

Kemitraan mutualistik adalah persekutuan antar dua belah pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda melakukan kerjasama. Manfaat saling memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan saling menunjang satu dengan lainnya.

c. *Conjugation partnership* (kemitraan melalui peleburan atau pengembangan)

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan sebagai paramesium. Dua paramesium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Selain model yang dijelaskan di atas, Sulistiyan (2004:131-132) juga menjelaskan tentang model kemitraan yang dikembangkan berdasarkan kehidupan organisasi pada umumnya, diantaranya adalah:

a. *Subordinate union of partnership*

Kemitraan *Subordinate union of partnership* atau kemitraan antara dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara *subordinate*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada dalam hubungan atas, bawah, kuat, lemah. Oleh karena itu kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

b. *Linear union of partnership*

Kemitraan *Linear union of partnership* atau kemitraan dengan penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi status atau legalitas. Kemitraan dengan melalui kerjasama Linear selanjutnya disebut dengan membedakan atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang

bermitra, yang menjadi tekanan utama adalah visi misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berbeda dalam satu garis lurus dan tidak saling subordinasi.

- c. *Linear collaborative* atau kemitraan melalui kerjasama linear dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra, yang menjadi tekanan utama adalah visi misi yang saling mengisi satu sama lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus tidak saling ter subordinasi.

Model-model kemitraan diatas berbeda satu dengan yang lain. Kemitraan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tergantung pada hubungan yang dijalin oleh pihak-pihak tersebut. Hubungan kemitraan tersebut sejajar dalam melakukan kerjasama atau hubungan atas bawah kuat lemah yang tidak ada peran fungsi yang seimbang. Selanjutnya, dalam konsep pertanian Sumardjo dkk (dalam Prasticha, 2013:15) menyebutkan bahwa dalam sistem agribisnis di Indonesia, terdapat lima bentuk kemitraan antara petani sebagai plasma dengan perusahaan besar, yaitu:

- a. Pola Kemitraan Inti-Plasma
Pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara itu, kelompok tani bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
- b. Pola Kemitraan SubKontrak
Pola subkontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- c. Pola Kemitraan Dagang Umum
Pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut.
- d. Pola Kemitraan Keagenan
Pola kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada

kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh pengusaha mitra besar.

e. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola kemitraan KOA merupakan hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan.

3. Tantangan dan Hambatan dalam Kemitraan

Dalam setiap kegiatan kemitraan, dalam perjalanan pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan dan hambatan yang tentu saja mengganggu keharmonisan pihak yang bermitra. Menurut Farazmand (dalam Domai, 2011:85-86) tantangan dan hambatan tersebut antara lain;

- a. Ketidakpercayaan. Tidak percaya atau kecurigaan menjadi faktor penghancur dalam bermitra. Hal ini karena dalam bekerjasama harus dilandasi oleh model awal yaitu saling percaya.
- b. Melebarnya gap antara bangsa utara dan selatan. Perbedaan negara-bangsa memunculkan sebuah masalah besar bagi *partnership* global dan regional. Perbedaan dalam kapasitas, sumberdaya, dan struktur kekuasaan di antara anggota *partnership* adalah ancaman serius bagi implementasi sukses persetujuan *partnership*.
- c. Kecenderungan struktur kekuasaan untuk mendominasi secara global bisa memberikan hambatan lainya karena membuat partner yang di dominasi menjadi anggota partner yang patuh.
- d. Harapan tinggi dari terbentuknya *partnership*. Masalah dependensi semakin buruk ketika tanggungjawab diberikan ke pihak lemah atau ketika pihak lemah memiliki harapan salah bahwa pihak kuat bisa memikul bebantersebut.
- e. Kondisi lingkungan potensial. Kondisi yang beragam dari politik dan ideologi sampai spektrum sosial dan ekonomi. Dimana arogansi budaya, ideologi, dan politik yang menjadi terbentuk dan menjadi sebuah hambatan dasar bagi pembentukan *partnership* yang terhormat

- f. Hambatan budaya dan religius. Sama seperti hambatan ideologi dan budaya, perpecahan religius memainkan sebuah hambatan penting dalam pembentukan *partnership*
- g. Perbedaan etnis dan rasial. Rasisme dan perpecahan etnis merusak kepercayaan, merusak hati nurani penindas, dan menimbulkan siklus tanpa akhir berisi kebencian dan perpecahan.

Tantangan dan hambatan yang dipaparkan oleh Farazmand yang dikutip oleh Domai tersebut merupakan tantangan dan hambatan yang relatif terjadi dalam setiap kegiatan bermitra atau bekerjasama. Oleh karena itu, keterbukaan dan kepercayaan dalam bermitra merupakan kunci utama yang harus dipegang dalam proses kemitraan, termasuk juga program kemitraan GP3K yang terjalin antara PT. Pertani (Persero) dan petani mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.

C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

1. Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Menurut Kepmen BUMN No. Kep-236/MBU/2003 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. Secara konsep PKBL yang dilaksanakan BUMN tidak jauh berbeda dengan *best practices* CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta, sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan praktek CSR yang dilakukan oleh BUMN. Peran PKBL BUMN mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL BUMN juga diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu:

- a. pengurangan jumlah pengangguran (*pro job*)
- b. pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro poor*)
- c. peningkatan pertumbuhan ekonomi(*pro growth*)

PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. (Penjelasan UU No. 19 Tahun 2003)

Dalam penelitian ini, program kemitraan yang dijalankan oleh PT Pertani (Persero) selaku BUMN sebagai bentuk PKBL terhadap petani mitra adalah Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K). Program ini dilaksanakan dalam rangka menunjukkan peran BUMN dalam penguatan ketahanan pangan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan PKBL menurut paduan KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan

Energi) PT. Pertani (Persero), dimana PKBL atau Program Kemitraan Bina Lingkungan adalah pinjaman yang berasal dari penyisihan laba perusahaan (BUMN) yang diberikan kepada petani untuk kegiatan budidaya tanaman. Selanjutnya, KKP-E atau Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sendiri adalah kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui kelompok tani atau koperasi primer baik untuk kegiatan budidaya tanaman maupun pengadaan.

2. Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) merupakan suatu bentuk implementasi PKBL dari BUMN sektor pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Menurut Darmawan (2012:22) Awal munculnya program GP3K ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam masalah yang dihadapi petani. “Pertama, produktivitas petani Indonesia tidak maksimal. Lahan pertanian seharusnya bisa menghasilkan 5 ton per hektare, tapi pada kenyataannya tidak bisa. Kedua, petani sulit mendapatkan akses pembiayaan. Walaupun jenis usahanya *feasible* (layak), tapi petani itu tidak *bankable* (layak mendapat pinjaman bank). Masalah ketiga, petani sulit mendapatkan sarana produksi yang tepat waktu, jenis, mutu, tempat, harga. Ditambah lagi kendala dalam pemasaran hasil produksi sehingga ketika panen raya harganya justru jatuh. Pada dasarnya program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) merupakan sinergi BUMN dengan petani”. Program ini

dilaksanakan dalam rangka menunjukkan peran BUMN dalam penguatan Ketahanan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2011.

a. Tujuan Program :

Mendorong produktivitas padi, jagung, dan kedelai petani pada tingkat frontier (terdepan) melalui paket penyediaan teknologi, modal, saprodi sesuai dengan kalender tanam dan jaminan harga.

b. Manfaat Program :

- 1) Melaksanakan visi BUMN sebagai alat untuk kesejahteraan melalui sistem kemitraan
- 2) Meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani melalui pendekatan kemitraan agar pendapatan petani bertambah
- 3) Bertambahnya kapasitas produksi pangan nasional dan aktivitas ekonomi pedesaan
- 4) Menekan inflasi.

Program GP3K ini merupakan pola kemitraan BUMN dengan petani yang sistem pembayarannya menggunakan pola yarnen, yaitu seluruh kebutuhan sarana produksi petani dibantu dalam bentuk natural dan dikembalikan pada saat panen. Sedangkan sumber dana atau penyanggah dana dari program GP3K adalah pihak perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Pihak perbankan merupakan pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai pemberi kredit. Dimana program dari pihak perbankan tersebut adalah KKP-E atau Kredit Ketahanan Pangan dan

Energi, yaitu kredit yang diberikan oleh Perbankan yang ditunjuk pemerintah melalui Kelompok Tani atau Koperasi Primer baik untuk kegiatan budidaya tanaman maupun pengadaan. Sedangkan pendanaan atau pembiayaan merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Program Kemitraan yang berasal dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Non Perbankan yang ditunjuk langsung oleh PT Pertani pusat. Dalam program ini PT Pertani pusat menunjuk Bank BRI sebagai sumber dana.

D. Pembangunan Pertanian

1. Pengertian Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*) (Iqbal dan Sudaryanto, 2008). Sedangkan menurut Soekartawi (1995:1) Pembangunan seringkali diartikan pada pertumbuhan dan perubahan. Jadi, pembangunan pertanian yang berhasil dapat diartikan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi dan sekaligus terjadi perubahan masyarakat tani dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Walaupun kata “pertumbuhan” dan perubahan ini terlihat sederhana, namun materi yang terkandung didalamnya

sangat banyak. Hal ini disebabkan karena banyaknya variabel-variabel yang membentuk pertumbuhan sektor pertanian dan perubahan yang terjadi tersebut.

Di Kabupaten Malang sendiri, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pertanian sesuai dengan kebijakan program yaitu:

- a. Penguatan dan penumbuhan kelembagaan petani,
 - b. Penguatan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan pendampingan pertanian,
 - c. Penguatan basis data dan informasi pertanian,
 - d. Pengamanan ketersediaan pangan dan produksi melalui upaya-upaya untuk mengamankan lahan irigasi dan optimalisasi lahan,
 - e. Pelaksanaan diversifikasi konsumsi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan meningkatkan mutu gizi,
 - f. Meningkatkan nilai tambah produk dan kualitas produk pertanian melalui peningkatan pengolahan hasil dan pengembangan agroindustri;
 - g. Peningkatan dukungan sektor lain untuk pembangunan pertanian, terutama peningkatan akses perkreditan untuk usahatani dan pengamanan ketersediaan sarana produksi pertanian. (www.distanbun.malangkab.go.id)
2. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Kemitraan Usaha

Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis serta kemitraan usaha. Dalam agribisnis dikenal konsep agribisnis sebagai suatu sistem dan agribisnis sebagai suatu usaha (perusahaan). Di samping itu dikenal azas-azas dalam pengembangan agribisnis yang berkelanjutan, seperti dikemukakan oleh Sudaryanto dan Hadi (1993) serta Hadi *et al.* (dalam Saptana dan Ashari, 2007:126) yaitu terpusat, efisien, menyeluruh dan terpadu, serta menjaga kelestarian lingkungan. Struktur agribisnis yang berkembang saat ini dapat digolongkan sebagai tipe dispersal atau tersekat-sekat, kurang memiliki daya saing, dan tidak berkelanjutan. Menurut Simatupang (1995) dalam Saptana dan Ashari

(2007:126) Hal itu disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: 1) tidak ada keterkaitan fungsional yang harmonis di antara kegiatan atau pelaku agribisnis, sehingga dinamika pasar belum dapat direspons secara efektif karena tidak adanya koordinasi, 2) terbentuknya margin ganda sehingga ongkos produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil yang harus dibayar konsumen menjadi lebih mahal, atau sistem agribisnis tidak efisien, dan 3) tidak adanya kesetaraan posisi tawar antara petani dan pelaku agribisnis lainnya sehingga petani sulit mendapatkan harga pasar yang wajar.

Ada dua sistem koordinasi, yaitu koordinasi melalui harga pasar dan antarpelaku agribisnis. Operasionalnya dapat dilakukan melalui kelembagaan kemitraan usaha agribisnis. Sistem yang pertama tidak dapat menjamin keterpaduan produk, dan sebaliknya untuk sistem kedua. Pembangunan pertanian berkelanjutan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis dan kemitraan usaha memberikan beberapa manfaat sekaligus, yaitu: 1) mengoptimalkan alokasi sumber daya pada satu titik waktu dan lintas generasi, 2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas produk-produk pertanian karena adanya keterpaduan produk berdasarkan tarikan permintaan (*demand driven*), 3) meningkatkan efisiensi masing-masing subsistem agribisnis dan harmonisasi keterkaitan antarsubsistem melalui keterpaduan antarpelaku, 4) terbangunnya kemitraan usaha agribisnis yang saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan, dan 5) adanya kesinambungan usaha yang menjamin stabilitas dan kontinuitas pendapatan seluruh pelaku agribisnis. Pendekatan tersebut hanya akan berhasil bila dilakukan secara partisipatif.

Syahyuti (2006) dalam Saptana dan Ashari (2007:127) mendefinisikan partisipasi sebagai proses pelibatan seluruh pihak dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan dengan pendekatan sistem agribisnis dan kemitraan usaha adalah proses yang melibatkan keseluruhan pelaku agribisnis dari hulu hingga hilir dalam pengambilan keputusan substansial yang berkaitan dengan eksistensi dan keberlanjutan usaha. Pembangunan pertanian secara partisipatif akan menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Saptana dan Ashari (2007:126-127)

3. Pembangunan Pertanian di Indonesia

Sektor pertanian bagi bangsa Indonesia memegang peranan yang sangat penting karena merupakan basis perekonomian utama sebagai negara berkembang dengan potensi alam yang sangat mendukung. Komoditas utama yang banyak diusahakan oleh petani di Indonesia adalah padi, karena padi merupakan tanaman pokok penghasil beras sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu menjadikan potensi permintaan beras semakin meningkat seiring dengan meningkatnya penduduk Indonesia. Prasticha (2013:24)

Namun permasalahan modal yang menjadi kendala bagi petani dalam mengusaakan pertanian relatif kecil, meskipun harga dasar gabah selalu naik setiap tahun menjelang masa tanam, tetapi kenaikan ini hampir selalu tidak mencukupi kelangsungan hidup produsen padi atau petani itu sendiri. Hal ini tentu saja

menyebabkan rendahnya pendapatan petani sehingga secara tidak langsung juga berakibat pada berkurangnya kesempatan untuk memperluas atau mengembangkan usaha taninya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah melalui kementerian BUMN mengambil strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional dengan meningkatkan produksi yang secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui program kemitraan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada usaha tani tanaman pangan terutama padi. Prasticha (2013:24)

Di masa orde baru, pembangunan pertanian sendiri telah menghasilkan beberapa hasil. Pertama, peningkatan produksi, khususnya disektor pangan yang berpuncak pada pencapaian swasembada pangan. Ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, dengan harga relatif murah, memberikan kontribusi terhadap proses industrialisasi dan urbanisasi yang membutuhkan pangan murah. Kedua, sektor pertanian telah meningkatkan penerimaan devisa disatu pihak dan penghematan devisa dilain pihak, sehingga memperbaiki posisi neraca pembayaran Indonesia. Ketiga, pada tingkat tertentu sektor pertanian telah mampu menyediakan bahan-bahan baku industri sehingga melahirkan agroindustri. Pemerintah Desa merupakan bagian terdepan dan sangat berpengaruh dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan pedesaan sangat beragam, hal tersebut disebabkan faktor pendukung antara lain: Pendidikan, sosiokultur, letak geografis, potensi perekonomian desa dan kemampuan serta kemauan masyarakat untuk maju. (Soetrisno, 2002:60)

Apabila kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam sektor pertanian baik pada lingkungan internal maupun eksternal di negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, terdapat tiga masalah pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan paradigma baru pembangunan pertanian negara-negara yang sedang berkembang. Pertama, ditengah-tengah perubahan eksternal dan internal tersebut, bagaimana kita dapat menciptakan kebijaksanaan pertanian yang menjamin agar para petani memperoleh hak mereka atas air dan bibit yang mereka butuhkan untuk mengelola usaha tani mereka masing-masing. Kedua, masalah pertanian tersebut berkaitan dengan masalah kedua yaitu bagaimana membangun suatu pertanian yang dapat menjamin adanya suatu sistem ketahanan pangan bagi negara-negara yang sedang berkembang. Ketiga, bagaimana kita dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara-negara berkembang, tidak hanya untuk kepentingan pengembangan sektor pertanian, tetapi juga sektor-sektor lain dalam perekonomian nasional negara-negara tersebut, demi kesejahteraan rakyat. (Soetrisno, 2002:60)

E. Ketahanan Pangan

1. Pengertian Ketahanan Pangan

Dalam Undang Undang No 18 Tahun 2012 Pasal 1 (1), dijelaskan bahwa “pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”. Sedangkan ketahanan pangan sendiri menurut Undang-undang No 18 Tahun 2012 Pasal 1 (4) adalah “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.

Selanjutnya menurut Suryana (2003) dijelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat diartikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya pangan yang cukup diartikan ketersediaan pangan. Dalam arti luas bukan hanya beras tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda/zat lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta aman dari kaidah agama.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dapat diartikan pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh oleh setiap rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Menurut Suryana (2003) ketahanan pangan juga merupakan suatu sistem ekonomi pangan yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan.

Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga subsistem tersebut.

- a. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara ekspor dan impor pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa, sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, terbatas dan tersebar antar wilayah, volume pangan yang tersedia bagi masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya, serta stabil penyediaannya dari waktu ke waktu.
- b. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata. Sistem distribusi bukan semata-mata mencakup aspek fisik dalam arti pangan yang tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Surplus pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan bagi individu masyarakatnya. Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar global, agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk.
- c. Subsistem konsumsi menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan asupan (intake) zat pangan dan gizi yang cukup dan berimbang sesuai dengan kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, kuat, cerdas dan produktif. Dalam subsistem konsumsi terdapat aspek penting yang lain yaitu aspek diversifikasi. Diversifikasi pangan merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi, sekaligus melepas ketergantungan masyarakat atau sejenis pangan pokok lain yaitu beras. Ketergantungan yang tinggi tersebut dapat memicu instabilitas manakala pasokannya terganggu. Sebaliknya agar masyarakat menyukai pangan alternatif perlu ditingkatkan cita rasa, penampilan dan kepraktisan pengolahannya agar dapat bersaing dengan produk yang telah ada. Dalam kaitan ini teknologi pengolahan sangat penting.

Dari uraian diatas, jelas diketahui bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi yang wajib dipenuhi oleh setiap negara mengingat pentingnya pangan sebagai kebutuhan dasar manusia dan mencerminkan kekuatan bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan pangan nasional harus dijalankan secara berkesinambungan agar tercapai ketahanan pangan yang baik.

2. Tujuan Ketahanan Pangan

Seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang Undang No 18 Tahun 2012 dimana Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
- b. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
- h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.

Dengan berjalanya penyelenggaraan pangan yang baik, maka semua tujuan diatas tentu akan terwujud, dan ketahanan pangan nasional juga pasti akan tercapai. Bahkan pembangunan ketahan pangan sendiri juga sudah diatur dalam amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu. Pada saat itu, untuk menjamin berkelanjutannya, GBHN 1999-2004 telah mengarahkan bahwa ketahanan pangan dikembangkan dengan bertumpu pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal/domestik, distribusi ketersediaan pangan mencapai seluruh wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat agar mampu mengakses pangan secara berkelanjutan. Selain itu, GBHN tersebut juga

mengarahkan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional pada saat itu adalah: (1) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan kooperatif sebagai negara maritim dan agraris, sesuai kompetensi dan produk unggulan disetiap daerah; (2) Memberdayakan pengusaha kecil menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pentingnya ketahanan pangan sudah lama menjadi prioritas pemerintah sebagai tujuan utama dan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional

F. Kesejahteraan Petani

1. Kesejahteraan Petani di Indonesia

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di Indonesia sebagian besar disumbangkan oleh petani khususnya yang berada di pedesaan, karena dari 28,07 juta penduduk miskin pada bulan Maret 2013, sebanyak 17,74 jutanya merupakan penduduk pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai petani atau buruh tani (BPS, 2013). Hal ini tentu saja menjadi sebuah ironi karena petani merupakan produsen utama pangan nasional yang tentu saja memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Hadisapoetro (dalam Mardikanto, 1994:231) pada saat pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Usaha Tani pernah mengungkapkan bahwa pelaksana utama pembangunan pertanian di Indonesia adalah justru petani-petani kecil, yang

merupakan bagian terbesar, baik dipandang dari sudut jumlah luas usaha tani yang diusahakan, ataupun dipandang dari sudut jumlah dan nilai produksi yang dihasilkan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan pertanian yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia sudah seharusnya selalu memperhatikan petani kecil sebagai sasaran utama karena selama ini petani-petani kecil bisa dikatakan merupakan golongan ekonomi lemah, baik dari sisi permodalan, produktivitas, pendapatan, hingga lemahnya semangat untuk maju sehingga luput dari perhatian pemerintah. Kondisi sosial budaya petani tersebut merupakan masalah utama dalam fungsi sektor pertanian di dalam pembangunan nasional.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan data statistik yang ada, tingkat kemiskinan di Indonesia lebih banyak disumbangkan oleh masyarakat pedesaan dibanding masyarakat perkotaan. Perbedaan pendapatan tersebut berkaitan erat dengan produktivitas para petani Indonesia, yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, kebijakan pemerintah dalam hal pemberian intensif kepada petani, dan sebagainya. Menurut Burki (dalam Suryana, 2010:5) terdapat enam faktor yang menyebabkan kemiskinan masih tetap melekat pada sebagian penduduk pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Keenam faktor tersebut adalah: (1) pertumbuhan ekonomi yang lamban; (2) stagnasi produktivitas tenaga kerja; (3) tingkat semi pengangguran yang tinggi; (4) tingkat pendidikan formal yang rendah; (5) fertilitas yang tinggi; dan degradasi kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan.

Selanjutnya, menurut A.T. Mosher (dalam Mardikanto, 1994) terdapat 5 syarat pokok dalam mensejahterakan petani melalui pembangunan pertanian yang meliputi :

- a. Pasaran untuk hasil usaha tani yang mencakup permintaan dalam negeri, permintaan internasional, pengembangan sistem tataniaga dan tindakan pemerintah dan swasta terhadap tata niaga.
- b. Teknologi yang selalu berubah dalam artian teknologi baru harus memberi harapan akan tercapainya tambahan hasil yang lumayan
- c. Tersedianya sarana produksi dan peralatan secara lokal.
- d. Perangsang produksi bagi petani ini mencakup : perbandingan harga yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar, dan tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya.
- e. Pengangkutan, tanpa adanya pengangkutan yang efisien dan murah keempat syarat pokok diatas tidak dapat dijalankan secara efektif.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan petani menjadi prioritas utama dalam pembangunan pertanian, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian, dimana lahan, potensi tenaga kerja, dan basis ekonomi lokal pedesaan menjadi faktor utama dalam pengembangan pertanian, oleh karena itu syarat-syarat pokok pertanian harus dipenuhi terlebih dahulu agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Jika salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi maka proses pembangunan pertanian akan terhambat atau bahkan mungkin tidak berjalan.

2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sejak medium 2013 kesejahteraan petani di Indonesia mulai mendapat jaminan dari pemerintah, mengingat telah disahkannya RUU tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dimana dalam Undang-undang yang diterbitkan pada tanggal

12 Juli 2013 tersebut diatur tentang berbagai macam persoalan yang selama ini menjadi hambatan petani dalam mengelola pertanian seperti masalah permodalan, kredit perbankan, hingga adanya jaminan-jaminan mulai dari ketersediaan lahan, intensif, dan jaminan jika terjadi gagal panen. (Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2013)

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2013, dijelaskan juga bahwa “Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, dan berkelanjutan. Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan

bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.” (Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2013)

Selain kebijakan perlindungan terhadap petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik. pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-usaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan kelembagaan petani. (Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2013)

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan petani adalah petani, terutama kepada petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha tani); petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani, yang pada umumnya

berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektare, dan bahkan sebagian dari Petani tidak memiliki sendiri lahan usaha tani atau disebut petani penggarap, bahkan juga buruh tani. Petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani, dan akses pasar. Selain itu, petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan petani. Seperti yang tertera dalam Pasal 3 UU No.19 Tahun 2013, dimana perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani. (Undang-undang No. 19 Tahun 2013)



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah untuk mengungkap suatu permasalahan tertentu dimana dalam menjalankan penelitian menggunakan metode tertentu yang membantu dan mempermudah peneliti untuk dapat memahami permasalahan yang akan diteliti. Menurut Nazir (2003:14) Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian dapat digunakan sebagai pencari pengetahuan dan pemberian arti secara terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan suatu percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian

yang disesuaikan berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dengan menggunakan metode yang tepat maka akan didapat suatu data atau informasi yang dapat mendukung penelitian sehingga ruang lingkup penelitian akan lebih jelas dan terfokus.

Berdasarkan rumusan maslah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2003:54) Penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif sendiri sengaja dipilih untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan faktual terhadap fenomena dan permasalahan yang terjadi, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sinergi antara PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, serta hasil yang diperoleh dari sinergi tersebut terutama terkait dengan implementasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), dan lebih rinci lagi untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dari sinergi yang terjalin tersebut.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu fokus penelitian. Fokus penelitian sendiri merupakan penetapan hal-hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Menurut Moleong (2001:237) Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif berfungsi untuk:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang *inquiri* (masukan), misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi;
2. Memenuhi kriteria *inquiri-eksekusi* (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan. Dengan adanya fokus penelitian seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan.

Disanalah letak pentingnya fokus penelitian, sehingga peneliti kualitatif harus menetapkan fokus atau batasan karena didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dana dan waktu dari proses penelitian itu sendiri. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kemitraan Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K), yang meliputi:
 - a. Bentuk Kemitraan;
 - b. Peran Aktor Pelaksana;
 - c. Implementasi Program;

d. *Output* Sinergi;

2. Faktor pendukung dan penghambat dari kemitraan antara Pemerintah, PT. Pertanian (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang terkait program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K), yang meliputi
 - a. Faktor Pendukung;
 - b. Faktor Penghambat;

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah keseluruhan ruang dimana suatu peristiwa dan fenomena ditangkap. Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan:

1. Mayoritas penduduk Desa Tulungrejo adalah petani, dan sebagian besar merupakan petani mitra PT. Pertanian (Persero) Cabang Pemasaran Malang, sehingga diharapkan dapat diperoleh informasi beragam terkait dengan peran masyarakat dan pemerintah desa dalam bersinergi dengan BUMN Sektor pertanian.
2. Aspek kemudahan dalam mengakses informasi, baik secara tempat, waktu, maupun biaya.

Sedangkan yang dimaksud situs penelitian adalah tempat atau lokasi dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sendiri situs penelitiannya adalah PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang yang beralamat di Jl. Raya Karanglo No. 131 Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Moleong (2001:157) Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah: “Kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Sedangkan yang menjadi sumber data adalah narasumber yang telah dianggap menguasai bidang permasalahan dan berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dari uraian diatas, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung pada saat melakukan penelitian, sumber data merupakan informan atau responden yang dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa, PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang dan masyarakat khususnya petani mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang.
2. Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini sendiri berupa dokumen-dokumem, catatan-catatan, arsip-arsip, serta sumber-sumber lainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (Sugiyono:2011). Dalam penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono 2011:231) mendefinisikan *interview* sebagai berikut “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and join construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk

mengingatkan *interviewer* mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung.

2. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Menurut Patton (dalam Poerwandari, 1998) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Menurut Patton (dalam Poerwandari, 1998) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena :

- a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi.
- b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara.
- e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*) ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011:240). Dengan membaca dokumen dan mengadakan pencatatan-pencatatan melalui dokumentasi yang ada di wilayah penelitian, maka peneliti dapat mempertajam perasaan untuk meneliti serta memberikan analisis yang lebih akurat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Menurut Moleong (2001:117), “penelitian dengan metode kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Namun peranan penelitianlah yang sangat menentukan keseluruhan sekenarionya.” Artinya peneliti merupakan instrumen utama dalam pendekatan kualitatif ditunjang dengan pencatatan dokumen dan pencatatan sistematis. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah:

1. Peneliti sendiri, dimana pemaana peneliti bertindak selaku instrumen yang mengamati dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung serta berkaitan dengan obyek penelitian. Oleh karena itu data-data yang diperoleh dilapangan harus benar-benar dipahami peneliti.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*), digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan atau mempermudah saat melakukan wawancara kepada narasumber atau informan sehingga tidak keluar dari permasalahan yang diteliti. Selain itu pedoman wawancara juga berguna untuk membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan guna kegiatan penelitian.
3. Perangkat Penunjang, sebagai alat bantu dalam memperoleh data seperti buku catatan, kamera digital, alat rekaman melalui handphone, dsb.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengolah data yang diperoleh dari pustaka dan lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan baru maupun

dalam bentuk kebenaran hipotesa. Menurut Nazir (2003:358), Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah. Selain itu dalam penelitian kualitatif analisa data harus dilakukan sejak awal dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan rancangan analisa data menurut model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, dimana peneliti melakukan penelitian lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan sumber informan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2011).

1. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hal tersebut dikarenakan data yang diinginkan peneliti berbeda dan tidak selalu dalam bentuk dokumen, namun juga dapat berupa pernyataan atau gambar. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan wawancara untuk mendapat informasi mendalam dari beberapa informan yang berhubungan dengan tema penelitian. Selain itu, dalam proses pengumpulan data peneliti juga melakukan berulang-ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan data dan kejenuhan data khususnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus dalam penelitian ini.

2. Reduksi Data

Proses selanjutnya setelah pengumpulan data adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian mencari tema dan polanya. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap semua data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan dengan berbagai metode yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian reduksi data dilakukan dengan cara membuat tabelisasi dan abstraksi, yaitu membuat rangkuman dan tabelisasi dari masing-masing fokus yang telah ditetapkan. Dalam proses ini peneliti juga mengabaikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan, tujuan, dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang tersaji merupakan data yang benar-benar berhubungan dengan judul dari penelitian itu sendiri.

3. Penyajian Data

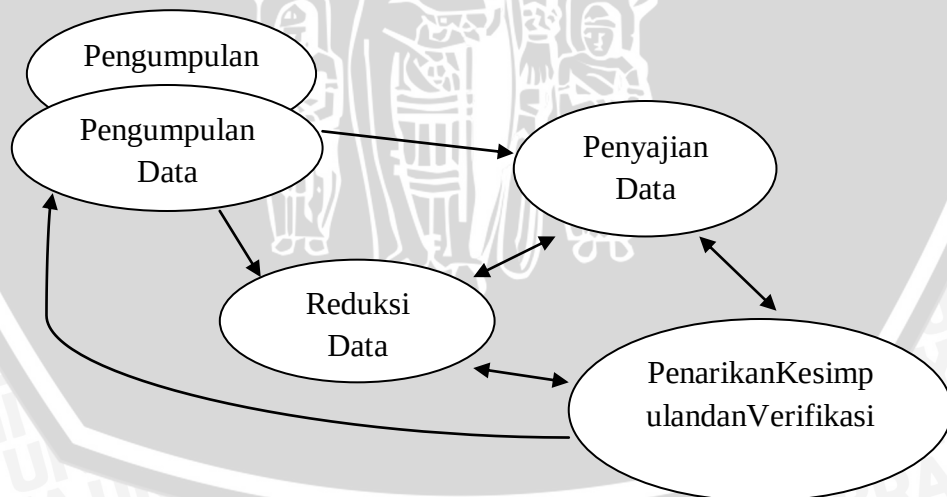
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011) menyatakan “*the most frequent form of display data for qoalitative research data in the past has been narative text*”. Maksudnya dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah teks yang bersifat naratif.

Dalam penelitian ini sendiri, data yang diperoleh dari lokasi dan situs penelitian akan disajikan sesuai dengan format dan ketentuan dari Fakultas Ilmu

Administrasi agar data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data ini juga diikuti oleh analisis data, dimana data yang telah direduksi interprestasikan oleh peneliti dan dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga tersaji lapiran yang memiliki kekayaan informasi dan pengetahuan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari analisa data yang didasarkan pada berbagai teori terkait. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif sendiri merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang masih belum terlihat jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori yang selanjutnya diperoleh suatu kesimpulan. Berikut ini merupakan skema dalam Analisis data Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2011:247):



Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data

H. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2008:121) keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat bagian yaitu:

1. *Credibility*

Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data dalam hasil penelitian kualitatif dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara melalui teknik yang berbeda dan berbagai waktu untuk memberikan data yang valid dan kredibel.

2. *Tranferability*

Merupakan validitasi eksternal yang menunjukkan drajat ketetapan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sampai hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, maka peneliti harus memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya sehingga pembaca dapat dengan jelas memahami hasil dari penelitian tersebut.

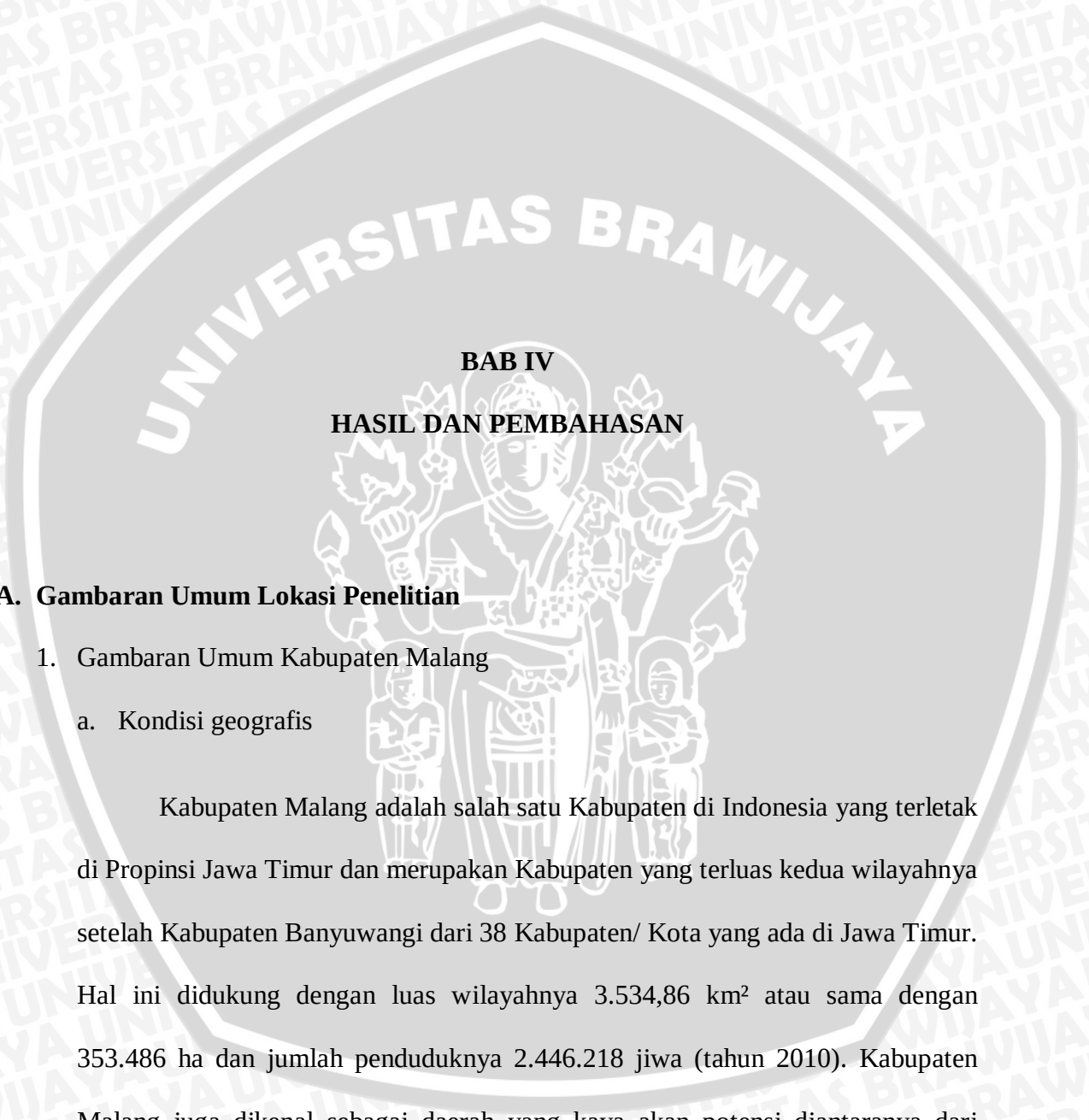
3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, dependabilitas dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang mana kalau proses penelitian tidak dilakukan akan tetapi datanya aada maka penelitian

tersebut tidak *reliable*. Untuk menguji dependabilitas dibutuhkan auditor independen atau pembimbing dalam mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian seperti bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, *confirmability* sama dengan dependabilitas sehingga pengujianya dapat dilakukan secara bersamaan yang mana menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan dan apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Kondisi geografis

Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang terletak di Propinsi Jawa Timur dan merupakan Kabupaten yang terluas kedua wilayahnya setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur. Hal ini didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km² atau sama dengan 353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.446.218 jiwa (tahun 2010). Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya. Kabupaten Malang terletak pada

112°17'10,90`` sampai 112°57'00`` Bujur Timur, 7°44'55,11`` sampai 8°26'35,45`` Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kab. Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, dan sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Malang sendiri terdiri dari 33 Kecamatan, 12

Kelurahan, 378 Desa, 3.185 Rukun Warga, 14.667 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk sebesar 2.459.982 jiwa merupakan salah satu Satuan Wilayah Pengembangan VI di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri. (www.malangkab.go.id)

Gambar 2. Peta Kabupaten Malang



Sumber: <http://malangkab.go.id>

b. Keadaan Topografi

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik.

Topografi Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi ini dipagari oleh :

- 1) Utara Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno (3.399 m)
- 2) Timur Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m)
- 3) Barat Gunung Kelud (1.731m)
- 4) Selatan Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m)

Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, sementara di sebelah selatan relatif kurang subur. Masyarakat Kabupaten Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri. Fisiografi Kabupaten Malang sendiri dapat terlihat seperti data sebagai berikut:

- 1) Daerah dataran rendah terletak pada ketinggian 250-500m diatas permukaan air laut
 - 2) Daerah Dataran Tinggi
 - 3) Daerah Perbukitan Kapur
 - 4) Daerah Lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300m diatas permukaan air laut - dpal)
 - 5) Daerah Lereng Tengger-Semeru di Bagian Timur (500-3600m dpal)
- (www.malangkab.go.id)

c. Keadaan Demografi

Berdasarkan data Sensus Penduduk Nasional tahun 2010, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.232.841(50,38%) jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.214.210(49,62%)jiwa. total sebesar 2.447.051 jiwa. Sex ratio penduduk Kabupaten Malang sebesar 98,78% yang berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. kepadatan penduduk nya mencapai 822 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya, berikut akan ditampilkan tabel data jumlah penduduk dan sex ratio di Kabupaten Malang dari tahun 2014 – 2012.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Malang 2004-2012

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Sex Ratio	Jumlah Rumah Tangga
2004	1.192.010	1.158.374	2.350.384	102,90	639.936
2005	1.190.105	1.203.854	2.393.959	98,86	645.377
2006	1.198.382	1.181.020	2.379.402	101,47	652.049
2007	1.210.912	1.190.712	2.401.624	101,70	645.911
2008	1.217.041	1.196.738	2.413.779	101,70	648.185
2009	1.217.377	1.207.934	2.425.311	100,78	700.162
2010	1.232.841	1.214.210	2.447.051	101,53	674.020
2011	1.234.173	1.225.809	2.459.982	100,68	663.495
2012	1.240.269	1.233.343	2.473.612	100,56	669.652

Sumber: malangkab.bps.co.id

d. Potensi Pertanian Kabupaten Malang

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang

potensi adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang (ILPPD Pemkab Malang, 2012). Namun tidak seluruh lahan pertanian di Kecamatan Ngantang diperuntukkan untuk komoditi sayuran, dari hasil penelitian dilapangan wilayah pertanian di Kecamatan Ngantang dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu lor conto (utara sungai) dan kidul conto (selatan sungai). Lor conto yang mencakup wilayah Desa Tulungrejo, Mulyorejo, Sidorejo, Sumberagung, Kaumrejo, Waturejo, dan Desa Jombak merupakan wilayah yang mayoritas pertaniannya merupakan tanaman padi. Sedangkan wilayah kidul conto yang mencakup Desa Ngantru, Pandansari, Sidodadi, Pagersari, dan Desa Banjarrejo merupakan wilayah dengan komoditi pertanian berupa sayuran. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kontur tanah serta kondisi geografis yang ada.

Selanjutnya, hortikultura unggulan yang menjadi ciri khas Kabupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan,

pengembangan pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit. (ILPPD Pemkab Malang, 2012)

2. Gambaran Umum Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Tulungrejo terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut. Secara administratif, Desa Tulungrejo terletak di wilayah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Waturejo. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Sumberagung/Kaumrejo Kecamatan Ngantang, sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Hutan Kecamatan Pujon. Jarak tempuh Desa Tulungrejo ke Ibu Kota Kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 7 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 50 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam.

Gambar 3. Peta Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang



Sumber: www.desatulungrejo.wordpress.com

Luas Wilayah Desa Tulungrejo adalah 779,699 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 46.859 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian adalah 98,620 Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 216.645 Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 404,500 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 0,050 Ha, sekolah 0,200 Ha, olahraga 0,020 Ha, dan tempat pemakaman umum 0,005 Ha. Wilayah Desa Tulungrejo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Tulungrejo terpetakan sebagai berikut: sangat subur 10,600 Ha, subur 248,865 Ha, sedang 45,800 Ha, tidak subur/ kritis 0 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 4 ton/ha. (www.desatulungrejo.wordpress.com)

b. Keadaan Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Tulungrejo adalah 3687 jiwa, dengan rincian 1954 laki-laki dan 1733 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1136 KK. Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Tulungrejo maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Tulungrejo Berdasarkan Usia tahun 2010

No	Usia	Jumlah	Presentase
1	0-4	279 orang	20.57%
2	5-9	286 orang	10.54%
3	10-14	296 orang	10.91%
4	15-19	285 orang	10.50%
5	20-24	291 orang	10.72%
6	25-29	271 orang	9.99%
7	30-34	284 orang	10.47%
8	35-39	296 orang	10.91%
9	40-44	296 orang	10.91%
10	45-49	297 orang	10.95%
11	50-54	291 orang	10.72%
12	55-58	255 orang	9.40%
13	>59	260 orang	9.58%
Jumlah	Total	3.687 orang	100%

Sumber: <http://desatulungrejo.wordpress.com>

c. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematis berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Tulungrejo.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tulungrejo

No.	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	40	1,84 %
2	Tidak Tamat SD	2	0,09 %
3	Tamat Sekolah SD	1216	57,44 %
4	Tamat Sekolah SMP	608	27,99 %
5	Tamat Sekolah SMA	286	13,16 %
6	Tamat Sekolah PT/Akademi	20	0,92%
Jumlah Total		2172	100%

Sumber: <http://desatulungrejo.wordpress.com>

Rentetan data kualitatif di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Tulungrejo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan

tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Tulungrejo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tulungrejo baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Tulungrejo yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Tulungrejo. Bahkan beberapa lembaga binbel dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Tulungrejo sekarang ini. (www.desatulungrejo.wordpress.com)

d. Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan adanya gejala masyarakat yang

terserang penyakit relatif tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Tulungrejo secara umum.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2010 di Desa Tulungrejo berjumlah lumayan banyak yaitu 586 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 227 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa Tulungrejo. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi. Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 586 balita di tahun 2010, masih terdapat 6 balita bergizi buruk, 20 balita bergizi kurang dan lainnya sedang dan baik. Hal inilah kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Tulungrejo ke depan lebih baik.(www.desatulungrejo.wordpress.com)

e. Mata Pencapaian

Secara umum mata pencapaian warga masyarakat Desa Tulungrejo dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian, peternakan, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang bekerja disektor peternakan berjumlah 300 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 300 orang yang bekerja di sektor industri 125 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencapaian berjumlah 3.664 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Tulungrejo Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah
1	Pertanian	1.114 orang
2	Peternakan	300 orang
3	Jasa	300 orang
4	Industri	125 orang
5	Lain-lain	2125 orang

Sumber: <http://desatulungrejo.wordpress.com>

3. Gambaran Umum PT. Pertani (Persero)

a. Sejarah Pendirian

PT. Pertani (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha yang berhubungan dengan sektor

pertanian. Berdirinya PT Pertani (Persero) dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959 tanggal 1 Januari 1959 yang membentuk Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah, disingkat BMPT. BMPT kemudian berubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara, disingkat BPU Pertani berdasarkan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 19/1960. BPU Pertani kemudian berubah lagi menjadi Perusahaan Pertanian Negara, disingkat PN Pertani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/1963 tanggal 1 Januari 1963.

Pada tahun 1973, PN Pertani menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1973 dan Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 46 tanggal 11 Januari 1974 dan Akte perusahaan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan Akte Perubahan yang dibuat Notaris Imas Fatimah, SH No. 45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT Pertani (Persero). Untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988, Anggaran Dasar PT Pertani (Persero) disesuaikan dengan Akte perubahan No. 81 Tanggal 27 Maret 1998 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimas, SH dan terakhir dengan Perubahan no. 1 Tanggal 2 Mei 2002 yang dibuat oleh Notaris Mintarsih Natamihardja, SH.

Kegiatan Operasional Perusahaan dilakukan oleh 37 kantor cabang pemasaran, 4 cabang pemasaran dan 16 unit penggilingan padi dengan kapasitas terpasang 72.000 ton, 28 unit produksi benih dengan kapasitas terpasang 60.000

ton, 55 unit pergudangan dengan kapasitas 400.000 ton, 7 unit produksi pupuk.

Bidang Usaha pokok PT Pertani (Persero) terdiri dari :

- 1) Produksi dan distribusi benih padi dan palawija
- 2) Produksi/distribusi pupuk organik
- 3) Produksi/distribusi pupuk an-organik
- 4) Jasa pergudangan dan pengelolaan sistem resi gudang

Pada kegiatan distribusi pupuk, PT Pertani (Persero) menjadi distributor utama pupuk utama di Indonesia. Distribusi pupuk mencapai 550.000 ton per-tahun (produksi dalam negeri maupun impor) jenis pupuk yang didistribusikan antara lain Urea, ZA, TSP, SP-36, Rock Phosphate, DAP, KCI, NPK dan lainnya. Pada kegiatan produksi beras, PT Pertani (Persero) menghasilkan beras kualitas dan beras medium untuk menjangkau pasar yang variatif. Beras yang dihasilkan berasal dari gabah hasil kerjasama dengan kelompok tani ataupun gabah yang dibeli dari pasar bebas dengan seleksi untuk menjamin kualitas beras

Pada kegiatan produksi benih, PT Pertani (Persero) menghasilkan benih padi bersertifikat dan benih jagung hibrida, jagung komposit serta kedelai dengan beragam varietas. Benih- benih tersebut diperoleh dari kerjasama penangkaran disekitar unit produksi benih.

b. Visi misi

- 1) Visi

Menjadi perusahaan agribisnis yang kompetitif, sehat, dan berkembang.

2) Misi

Menghasilkan dan memasarkan produk agribisnis yang memiliki daya saing dalam kualitas, pelayanan, dan harga dalam rangka menunjang pembangunan pertanian dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Menghasilkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa yang bermutu dan berdaya saing. Memasarkan sarana produksi dan komoditi pertanian serta jasa dengan pelayanan prima. Mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan untuk menghasilkan produksi yang tinggi serta berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional. Melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang pertanian.

Visi dan misi tersebut tercermin pada logo Perusahaan, dalam tujuannya yaitu: “Turut melaksanakan dan menunjang Kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, serta Pembangunan di bidang Pertanian pada khususnya dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.



Gambar 4. Logo PT. Pertani (Persero)

1) Filosofi Dasar Logo

Dinamika komoditas usaha yang kreatif muncul dari aktifitas usaha yang memelihara keseimbangan antara ekspansi dan keseimbangan.

2) Filosofi Bentuk

- a) Konsep bentuk segitiga melambangkan solidaritas dari seluruh komponen stakeholder perusahaan untuk mencapai tujuan bersama
- b) Makna 3 sisi yaitu: memberikan arti bisnis inti PT. Pertani adalah: produksi pemasaran, dan jasa
- c) Gambar didalam segitiga adalah stilasi dari huruf “P” dari huruf awal PERTANI dan merupakan visualisasi dari Benih/Gabah atau Daun
- d) Memberikan arti produk inti dari PT. Pertani, yaitu benih, pupuk dan beras.

3) Filosofi Warna

- a) Warna Hijau Tua: adalah warna alam berhubungan dengan eksplorasi pertumbuhan, kesuburan dan harmoni
- b) Warna Hijau Muda: melambangkan tunas-tunas yang tumbuh dan berkembang.
- c) Warna Orange: adalah warna kuat, energik, inovasi dan mendorong kemajuan perusahaan disegel bidang hingga menjadi usaha besar.

Terwujudnya misi dan visi tersebut didukung dengan ditetapkan budaya perusahaan yang harus dijiwai oleh semua jajaran, yaitu:

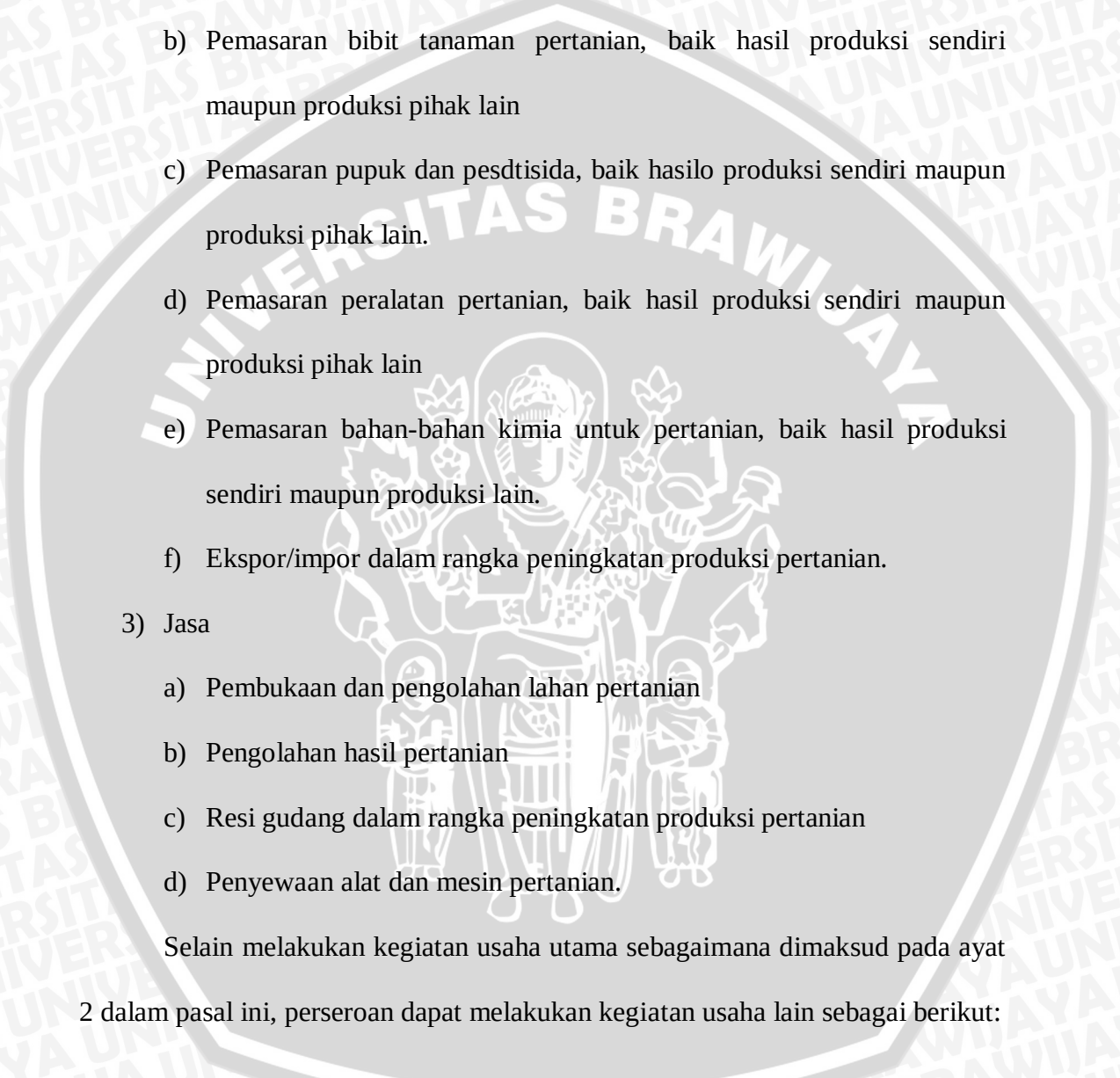
- 1) Bekerja merupakan bagian dari ibadah

- 2) Berpikir positif, bersikap jujur, dan bekerja secara profesional
 - 3) Berpikir proaktif untuk meningkatkan kinerja perusahaan
 - 4) Berusaha memperoleh hasil dan mutu pekerjaan yang lebih baik
 - 5) Menjaga kekompakan dan sinergi antar karyawan, serta dalam melaksanakan pemecahan masalah dengan pendekatan win-win solution.
- (Data Skunder PT. Pertani 2013)

c. Tujuan Perusahaan

Tujuan didirikannya PT. Peretani (Persero) adalah turut melaksanakan dan menunjang program pemerintah dibidang ekonomi serta Pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya dibidang pertanian. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18967.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan, Kegiatan usaha yang dijalankan adalah :

- 1) Produksi
 - a) Produksi komoditi pertanian termasuk produksi benih
 - b) Produksi bibit tanaman pertanian
 - c) Produksi pupuk dan pestisida
 - d) Produksi peralatan pertanian
 - e) Produksi bahan-bahan kimia untuk pertanian
- 2) Pemasaran

- 
- a) Pemasaran komoditi pertanian termasuk pemasaran benih, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain
 - b) Pemasaran bibit tanaman pertanian, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain
 - c) Pemasaran pupuk dan pestisida, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain.
 - d) Pemasaran peralatan pertanian, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain
 - e) Pemasaran bahan-bahan kimia untuk pertanian, baik hasil produksi sendiri maupun produksi lain.
 - f) Ekspor/impor dalam rangka peningkatan produksi pertanian.
- 3) Jasa
- a) Pembukaan dan pengolahan lahan pertanian
 - b) Pengolahan hasil pertanian
 - c) Resi gudang dalam rangka peningkatan produksi pertanian
 - d) Penyewaan alat dan mesin pertanian.

Selain melakukan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam pasal ini, perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk *trading house*, pengembangan kawasan industri, agro industri kompleks, real estate, pusat perbelanjaan, perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan, resort,

olah raga dan rekreasi, rest area, SPBU, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan perusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan

- 2) Melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

PT. Pertani (Persero) dalam pengadaan bahan bakunya melakukan sistem kontrak kerja sama dengan para petani penangkar. Kegiatan produksi benih dilakukan oleh petani yang bekerja sama dengan bantuan dan pembinaan dari pihak perusahaan, sedangkan sistem pengolahan dan pemasaran dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri. PT Pertani (Persero) meliputi 1 kantor pusat, 6 kantor area manager dengan 32 cabang dan unit pemasaran serta 28 UPB (Unit Produksi Benih), 1 SBU (*Strategic Business Unit*) perberasan dengan 4 cabang pemasaran dan 19 UPP (Unit Penggilingan Padi), 1 SBU (*Strategic Business Unit*) Hortikultura dengan 3 unit pemasaran, dan 1 UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan). Bisnis inti perusahaan yaitu distribusi pupuk, produksi dan distribusi beras, serta produksi dan distribusi benih padi dan palawija. Sementara bisnis lainnya, yaitu distribusi pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, distribusi benih/bibit dan hasil hortikultura, distribusi alat dan mesin pertanian, perdagangan hasil bumi, serta jasa gudang, angkutan dan pengolahan lahan.

d. Struktur Organisasi

Sesuai dengan lampiran Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero) No. PERT.001/ORG/01 tanggal 01 Maret 2010 tentang Tata Kerja dan Struktur Organisasi PT. Pertani (Persero) sehubungan dengan produk benih padi adalah sebagai berikut :

- 1) Divisi Produksi Benih, membawahi:
 - a) Bagian Produksi Benih Palawija
 - b) Bagian Produksi Benih Padi
- 2) Divisi Pengadaan/Produksi Pupuk dan Saprotan Lainnya, membawahi:
 - a) Bagian Pengadaan Pupuk dan Saprotan Lainnya
 - b) Bagian Produksi Pupuk dan Saprotan Lainnya
 - c) Cabang Pengadaan/Produksi Pupuk dan Saprotan Lainnya
- 3) Divisi Pemasaran Ritel, membawahi:
 - a) Bagian Pemasaran Benih dan Hasil Pertanian
 - b) Bagian Pemasaran Saprotan Tanaman Pangan
- 4) Divisi Pemasaran Korporasi, membawahi:
 - a) Bagian Pemasaran Saprotan Perkebunan, Proyek, dan Industri
 - b) Bagian Pemasaran Jasa dan Hasil Pertanian
- 5) Divisi Keuangan/Anggaran, membawahi:
 - a) Bagian Pajak dan Anggaran
 - Sub Bagian Pajak
 - Sub Bagian Anggaran

b) Bagian Keuangan

- Sub Bagian Pendapatan dan Pembiayaan Sub Bagian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

6) Divisi Akuntansi dan Teknologi Infformasi, membawahi:

a) Bagian Teknologi Informasi (T.I.)

- Sub Bagian Pengembangan Produk T.I.
- Sub Bagian Bantuan Teknis T.I.
- Sub Bagian Pengelolaan Data

b) Bagian Akuntansi

- Sub Bagian Verifikasi
- Sub Bagian Pembukuan
- Sub Bagian Analisa Laporan
- Verifikasi Daerah

7) Divisi SDM/Umum, membawahi:

a) Bagian Sarana

b) Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

- Sub Bagian Pembinaan Karir dan Pelatihan
- Sub Bagian Administrasi SDM

8) Divisi Penyelesaian Piutang, membawahi:

a) Panagih Piutang

b) Penagih Piutang Daerah

9) Divisi Penelitian dan Pengembangan, membawahi:

a) Peneliti

10) Satuan Pengawasan Intern (SPI), membawahi:

a) Pengawas

11) Sekretaris Korporasi, membawahi:

a) Bagian Hukum & Humas

12) Langsung di bawah Direktur Bina Usaha & Direktur Pemasaran:

a) Kepala Bagian Administrasi

13) Kantor Daerah, terdiri dari:

a) Area Manager

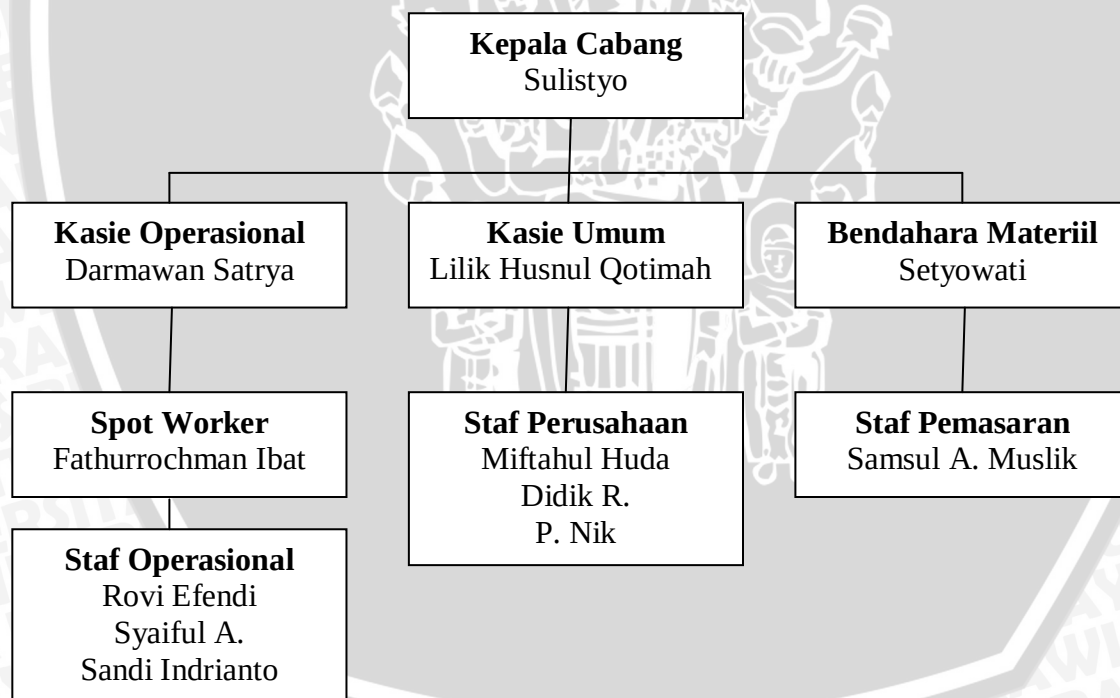
b) Sekretaris

c) Cabang

PT. Pertani (Persero) mengalami perubahan struktur organisasi sejak bulan Mei 2010, dimana setiap bidang usaha secara langsung dipimpin oleh seorang manajer seperti, area manajer produksi membawahi unit produksi benih, *marketing development officer* dan kepala cabang produksi pupuk. Dengan adanya perubahan struktur organisasi yang baru maka saat ini antara cabang pemasaran berdiri sendiri, sehingga pada kantor cabang pemasaran Malang selanjutnya bertanggung jawab langsung pada area manajer pemasaran dan area manajer Jawa Timur di Surabaya. Selanjutnya, akan di uraikan struktur organisasi PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang sebagai area manajer

pemasaran yang menjalin kerjasama langsung dengan petani mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, sebagai berikut:

Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang



Sumber: PT. Pertani (Persero) Malang 2013

▪ Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Kemitraan Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K)

- a. Bentuk Kemitraan

Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan suatu program kemitraan berupa Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Program Kemitraan GP3K ini digulirkan pemerintah dalam rangka mencapai Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju surplus beras 10 juta ton sesuai target pemerintah pada tahun 2014. Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menggunakan dua strategi, yang pertama peningkatan produksi dan yang kedua yaitu penurunan konsumsi beras. Dalam rangka peningkatan produksi, strategi yang ditempuh pemerintah adalah dengan peningkatan produktivitas, perluasan areal dan pengelolaan lahan, serta penurunan konsumsi beras dalam rangka diversifikasi masyarakat.

Program Kemitraan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sendiri merupakan kegiatan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kelompok tani binaan dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu BUMN yang melakukan program ini adalah PT. Pertani (Persero). Melalui GP3K

diharapkan adanya hubungan saling menguntungkan dimana PT. Pertani (Persero) memberikan kemudahan berupa pinjaman modal (pembiayaan) dan paket sarana produksi pertanian, teknologi budidaya, teknologi pasca panen dan menjamin pemasaran hasil produksi dari program kemitraan. Sedangkan petani akan melaksanakan program budidaya penanaman sesuai yang direkomendasikan dengan menggunakan paket sarana produksi dari PT. Pertani (Persero) dan akan menjamin pinjaman atas sarana produksi tersebut dengan hasil panennya. Pola kemitraan ini diharapkan menunjang pembangunan di sektor pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sendiri merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mengikuti program kemitraan GP3K dari PT. Pertani (Persero) untuk pengembangan tanaman padi. Melalui penerapan Program GP3K, petani di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang diharapkan akan mampu mengembangkan usaha tani yang selama ini belum optimal akibat permasalahan modal, luas lahan dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bp. Suprayitno selaku Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Desa Tulungrejo dalam wawancara sebagai berikut:

“Di Tulungrejo ini jumlah petaninya banyak mas, tapi ya itu rata-rata mereka cuma punya lahan yang terbatas, jadi hasil panennya juga sedikit, makanya mereka banyak yang utang dulu buat modal tanam berikutnya, karena uang hasil panennya sudah habis buat kebutuhan sehari-hari. Tapi sejak adanya Program GP3K khususnya di Kelompok Tani Rukun Makmur III, petani kita mulai banyak mengalami kemajuan, khususnya dalam peningkatan hasil panen dan proses kredit bunga lunak yang sangat

membantu petani disini.” (Wawancara Tanggal 3 April 2014 Pukul 10.00 WIB)

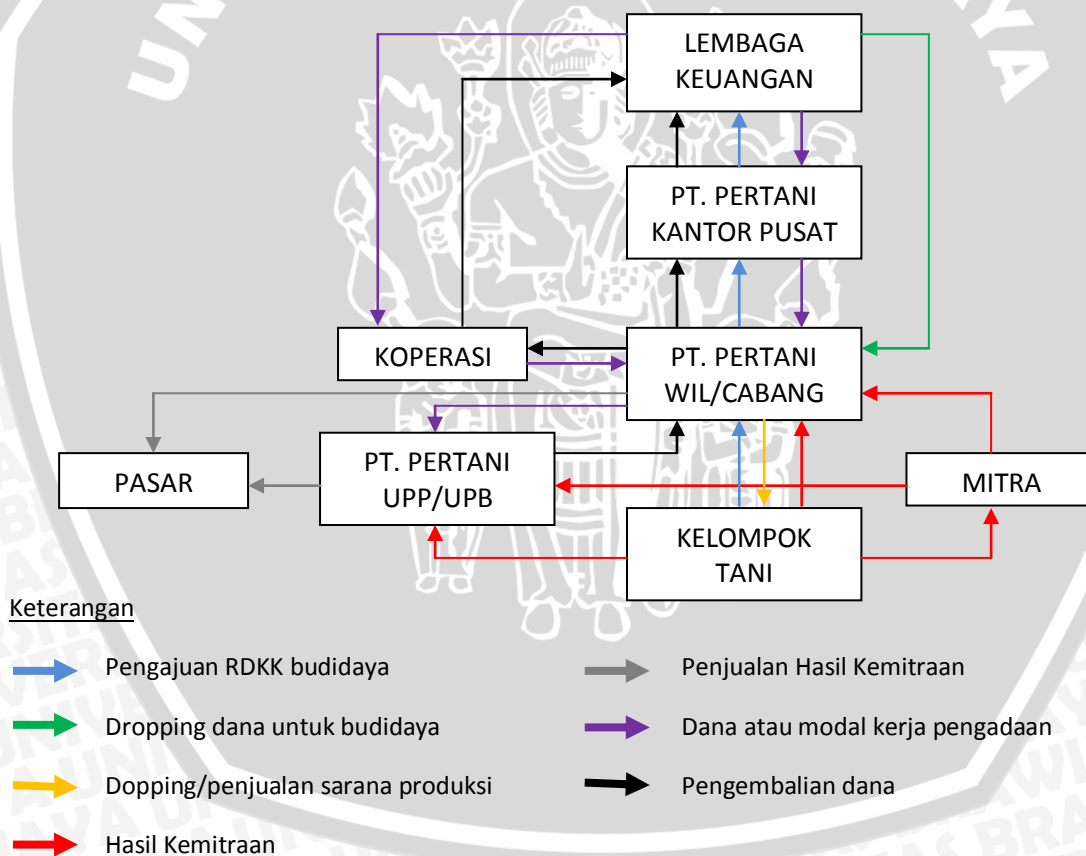
Dalam pelaksanaannya sendiri, program GP3K di Desa Tulungrejo ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga diperoleh *output* dan manfaat yang optimal bagi terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani khususnya di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. Selain itu, kelebihan dari Program GP3K ini adalah menggunakan pola kemitraan BUMN dengan petani yang sistem pembayarannya menggunakan pola yarnen, yaitu seluruh kebutuhan sarana produksi petani dibantu dalam bentuk natural dan dikembalikan pada saat panen. Sedangkan sumber dana atau penyandang dana untuk program GP3K khususnya di wilayah Malang ini adalah pihak perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sinergi yang terjalin antara PT. Pertani (Persero) dengan Petani mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan suatu bentuk Program Kemitraan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). GP3K sendiri mulai digulirkan pada tahun 2011 berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim. Dasar Hukum GP3K lain yaitu Instruktur Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pangan dan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, serta Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2001 tentang bantuan Langsung Benih Unggul

dan Pupuk terkait BUMN. Selanjutnya alur pelaksanaan program GP3K di PT.

Pertani (Persero) sendiri adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Alur Bisnis Program kemitraan PT. Pertani (Persero)



Sumber: Data Skunder PT. Pertani (Persero), 2013

Secara rinci alur sinergi program kemitraan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang adalah sbb:

- 1) Petani di Desa Tulungrejo melalui kelompok tani di setiap Dusun mengajukan Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK) kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang dan diteruskan ke pihak BRI. Setelah mendapat persetujuan, petani dengan dikoordinir ketua kelompok tani menyerahkan foto kopi KTP dan KK kepada PT. Pertani (Persero).
- 2) Dilakukan pengajuan dan penandatanganan surat perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam program GP3K, antara lain:
 - a) Petani dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Malang
 - b) Petani dengan Bank BRI
 - c) PT. Pertani (Persero) Cabang Malang dengan Bank BRI
- 3) Setelah surat perjanjian lengkap, BRI mengirimkan uang tunai ke PT. Pertani (Persero) Cabang Malang untuk kemudian dicairkan kepada petani di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang.
- 4) Selain mencairkan uang tunai PT. Pertani (Persero) Cabang Malang juga mengirimkan barang atau sarana produksi kepada petani, yang kemudian digunakan petani untuk kegiatan usaha tani padi.

- 5) Sebagian atau seluruh hasil usahatani padi kemudian dijual kepada PT. Pertani (Persero) Cabang Malang untuk pembayaran pinjaman atau sebagian lagi dijual ke pasar.
- 6) Pihak PT. Pertani mengembalikan pinjamannya kepada BRI.

(Data Skunder PT. Pertani, 2013)

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sinergi yang terjalin antara Pemerintah melalui BUMN sektor pertanian PT. Pertani (Persero) dan petani mitra di Desa Tulungrejo merupakan suatu sinergi yang berbentuk Program Kemitraan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), melalui Program GP3K diharapkan adanya hubungan saling menguntungkan dimana PT. Pertani (Persero) memberikan kemudahan berupa pinjaman modal (pembiayaan) dan paket sarana produksi pertanian, teknologi budidaya, teknologi pasca panen dan menjamin pemasaran hasil produksi dari program kemitraan. Sedangkan petani mitra di Desa Tulungrejo akan melaksanakan program budidaya penanaman sesuai yang direkomendasikan dengan menggunakan paket sarana produksi dari PT. Pertani (Persero).

b. Peran Aktor Pelaksana

Sebelum terjalin kerjasama antara Pemerintah, PT. Pertani (Persero) Cabang pemasaran Malang dan petani mitra di Desa Tulungrejo, maka masing-masing pihak harus mengetahui dan memahami prosedur serta peran yang harus

dijalani untuk menjadi mitra kerja. Dalam sistematika kemitraan yang meliputi ketentuan yang telah tercantum dalam surat perjanjian, pihak-pihak yang bermitra tersebut mencakup pihak PT. Pertani (Persero) Malang, Petani Mitra Desa Tulungrejo, serta pihak pemerintah mulai dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) hingga aparat Pemerintah Desa yang berwenang. Secara rinci, peran aktor pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan program kemitraan GP3K di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang adalah sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Dalam kegiatan persiapan program kemitraan GP3K, PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang melakukan beberapa pertemuan , yaitu:

a) Pertemuan I

Pertemuan pertama merupakan sosialisasi yang dilakukan pada pertemuan rutin kelompok tani yang dihadiri oleh petugas lapangan (*spot worker*) dari PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang, anggota kelompok tani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) setempat. Materi yang diberikan antara lain mengenai komoditas yang akan diusahakan yaitu padi dan hal-hal menyangkut Program GP3K baik persyaratan serta ketentuan yang harus dijalani kelompok tani yang menjadi peserta GP3K PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang serta peran masing-masing pihak dalam program kemitraan GP3K. Petani yang berminat kemudian didata oleh petugas mengenai identitas dan luasan lahan yang

akan diikuti program GP3K dan selanjutnya dikoordinir oleh ketua kelompok tani untuk mengumpulkan persyaratan kemitraan GP3K yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berlaku.

b) Pertemuan II

Setelah kegiatan sosialisasi pada pertemuan pertama, dilakukan pertemuan kedua untuk penandatanganan surat yang berhubungan dengan kemitraan GP3K diantaranya Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK), surat pengajuan kredit, surat kuasa dan perjanjian kemitraan. Surat-surat tersebut nantinya akan digunakan untuk proses pengajuan dana dan sarana produksi. Pertemuan ini dihadiri petugas PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang, ketua kelompok tani, dan PPL.

c) Pertemuan III

Pertemuan ketiga merupakan pertemuan yang dimaksudkan untuk pencairan dana dan pembagian sarana produksi dari PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang sesuai dengan Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah diajukan serta serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dan kwitansi penyerahan dana, sehingga setiap petani yang mengikuti program kemitraan GP3K diwajibkan datang. Selain itu, Petugas PT. Pertani (Persro) Cabang Pemasaran Malang juga memberikan bimbingan teknis penerapan teknologi baru dari paket sarana produksinya pada usaha tani padi agar

petani mampu menghasilkan gabah atau beras yang berkualitas dan berkuantitas tinggi, sehingga PPL juga diusahakan hadir nantinya dalam membantu petani. Adapun produk dari PT. Pertani (Persero) yang harus diaplikasikan oleh petani peserta GP3K adalah pupuk Oraganik Granul (POG) Biorganik, Pupuk Organik Cair (POC) Bintang Kuda Laut da NEB Strong Up Booster Urea

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaanya, bimbingan dan pendampingan oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang tidak diberikan secara menyeluruh dari tahap persiapan tanam, pemeliharaan hingga panen. untuk varietas benih padi, PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang tidak menentukan jenis atau varietas jenis padi yang harus ditanam. Hal ini disebabkan karena petani lebih mengetahui varietas apa yang cocok dan biasanya ditanam oleh mereka. Hanya saja PT. Pertani (Persero) menyarankan agar petani menggunakan benih unggul dan bersertifikasi serta pengaplikasian sesuai prosedur.

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam program kemitraan GP3K dilakukan untuk mengikuti, mengetahui kemajuan pencapaian tujuan ataupun sasaran serta memberikan upan balik pada upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam program kemitraan GP3K dengan melakukan kunjungan

langsung ke lahan petani peserta GP3K dan tanya jawab dengan PPL, ketua kelompok tani maupun petani peserta GP3K. Sifat dari kegiatan ini lebih sebagai alat kontrol dan perbaikan pelaksanaan program kemitraan GP3K pada tahap selanjutnya.

4) Tahap Penagihan atau Pengembalian Pinjaman

Jangka waktu kontrak kemitraan GP3K adalah satu musim tanam atau dihitung lima bulan. Pembayaran pinjaman dilakukan setelah panen hasil pertanaman. Setelah panen selesai, pihak PT. Pertani (Persero) dan petani mitra kembali melakukan pertemuan yang bertujuan untuk penagihan dan pelunasan atau pengembalian pinjaman paket sarana produksi GP3K. Jangka pinjaman ini dapat diperpanjang, dengan ketentuan bunga yang tetap berjalan, yaitu 0,5% per bulan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap aktor memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan. Peran tersebut tentu harus dijalankan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing aktor pelaksana. Sebagai BUMN yang merupakan motor penggerak dan pelaksana Program GP3K, PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang memiliki peran strategis mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan, seperti yang tertera

dalam wawancara dengan *Spotworker* PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang Bp. Rovi Efendi pada saat pra riset, sebagai berikut:

“Sebagai BUMN pelaksana, kita tentu memiliki tanggung jawab yang besar, ya mulai dari awal pelaksanaan GP3K sampai proses penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Semua itu kan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar target yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai. Kalau saya pribadi sebagai *spotworker* yang mengurus daerah Ngantang dan sekitarnya tentu sudah memahami prosedur kerja *spotworker* sebagai pedoman agar target penjualan tercapai dan yang pasti juga disesuaikan dengan kondisi lapangan, contohnya di Desa Tulungrejo, karena baru tahap I jadi kita harus sering pantau ke sana langsung. Semua itu perlu dilakukan agar program dapat berjalan sesuai rencana dan memperoleh hasil yang memuaskan” (Wawancara pada tanggal 26 September 2013 Pukul 10.00 WIB)

Sementara itu dari pihak Petani Mitra di Desa Tulungrejo, peran yang di jalankan petani tersebut juga tidak kalah pentingnya, hal tersebut dikarenakan petani merupakan aktor utama yang menjalankan langsung kegiatan usaha tani untuk memproduksi pangan melalui paket sarana produksi yang diberikan PT. Pertani (Perero). Petani melalui kelompok tani memiliki tugas sebagai penghasil pasokan pangan, baik itu untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasaran. Pentingnya keberadaan petani dalam mensukseskan program GP3K di Desa Tulungrejo dapat terlihat seperti dalam kutipan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur III Bp. Wardi sebagai berikut:

“Kalau ditanya peran petani disini seperti apa, tentu saya jawab banyak mas, mulai dari proses tanam benih, ngasih pupuk, ngurusin irigasi, belum lagi ngurusin kalau ada serangan hama, tapi itu semua kan memang sudah makanan kita sehari-hari. Kalau yang buat kita bingung itu ya masalah modal, sekarang harga benih sama pupuk itu sudah semakin mahal, makanya kita bermitra dengan PT. Pertani, soalnya kan

sistemnya kredit, barang langsung diantar kita tinggal mengaplikasikannya saja, urusan bayar bisa dicicil nanti kalau sudah panen”. (Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2014 Pukul 10.30 WIB)

dari petikan wawancara diatas, dapat terlihat bahwa petani memiliki peran yang sangat strategis dalam Kemitraan GP3K, yakni sebagai mitra utama PT. Pertani (Persero) dalam mengaplikasikan produk sarana pertanian mulai dari proses awal tanam hingga akhir masa panen. Selanjutnya Pemerintah yang terlibat langsung dalam Program kemitraan GP3K ini seperti aparaturnya Desa dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya sebagai aktor pelaksana yang menjembatani terjadinya kerjasama tersebut. Hal tersebut sesuai petikan wawancara dengan Bp. Suprayitno selaku Aparatur Desa Tulungrejo yang merangkap Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai berikut:

“Kita sebagai aparaturnya pemerintah Desa tentu mendukung langsung atas berlangsungnya kerjasama GP3K di Tulungrejo ini, saya pribadi sebagai ketua Gapoktan selalu berusaha untuk memfasilitasi Kelompok-kelompok tani di sini termasuk juga dalam menjalankan kemitraan GP3K dengan PT. Pertani, selain itu kita juga upayakan kerjasama dengan PPL dan Dinas Pertanian agar nantinya bisa dibantu apabila ditemukan kendala-kendala pada petani kita. Biasanya setiap tiga bulan sekali ada pertemuan kelompok tani untuk membahas setiap permasalahan yang ada pada petani, termasuk juga dalam membahas Program GP3K ini.” (Wawancara Pada Tanggal 27 Maret 2014 Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pihak pemerintah melalui aparaturnya Desa, PPL, dan Dinas Pertanian juga memiliki peran terutama dalam pengawasan dan pendukung berjalannya Program GP3K di Desa Tulungrejo. Oleh

karena itu, dari keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua aktor pelaksana, mulai dari PT. Pertani, Petani Mitra, hingga aparaturnya memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan berdasarkan pada persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan terutama oleh petani mitra dan perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu hubungan yang saling memerlukan dari setiap aktor yang bermitra, dalam artian perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok mitra memerlukan bimbingan dan penambahan hasil, saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra bersama-sama memperhatikan kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya dan saling menguntungkan untuk memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

c. Implementasi Program

Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan wilayah yang sebagian besar petaninya melakukan usaha pertanian untuk memperoleh pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhannya melalui Program Kemitraan GP3K, dari hasil survey diketahui bahwa kelompok tani yang aktif dan menjadi pelopor Program GP3K di Desa Tulungrejo adalah Kelompok Tani Rukun Makmur III di Dusun Gagar. Hal tersebut seperti yang ada dalam petikan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur III, Bapak Wardi sebagai berikut:

“Di Desa Tulungrejo, Kelompok Tani Rukun Makmur III ini bisa dibbilang pelopor GP3K mas, ya kita disini awalnya mengetahui dari Desa sebelah, katanya ada kredit pupuk yang menyediakan paket lengkap, setelah saya cari tahu infonya ternyata itu program kemitraan dari PT. Pertani Malang. Setelah itu petugasnya langsung datang dan mensosialisasikan kepada kita, kemudian kita tertarik untuk menerapkannya pada Kelompok Tani Rukun Makmur III ini, dan Alhamdulillah samapi saat ini masih berjalan dan hasilnya cukup memuaskan”. (Wawancara pada tanggal 3 April 2014 pukul 10.00 WIB)

Dari petikan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa petani Rukun Makmur III di Desa Tulungrejo memperoleh hasil yang positif dari kerjasama kemitraan GP3K, hal tersebut dikarenakan program kemitraan GP3K berpeluang untuk meningkatkan produksi hasil panen tanaman pangan petani dengan memberikan pinjaman modal berbunga rendah bagi petani berupa paket sarana produksi (saprodi) pertanian berkualitas dari PT. Pertani (Persero). Melalui program ini, diharapkan petani mampu menggunakan teknologi yang dianjurkan serta lebih mampu mengelola atau memanajemen usahatannya. Dalam program GP3K juga disosialisasikan kepada petani di Desa Tulungrejo mengenai penggunaan benih varietas unggul dan pupuk organik. Dengan penggunaan benih unggul, produksi padi akan meningkat dan kesuburan tanah semakin membaik dengan berkurangnya penggunaan pupuk an-organik.

Selain itu, Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang juga termasuk salah satu wilayah yang berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian dalam program GP3K, hal tersebut mengacu pada lokasi Desa Tulungrejo yang strategis baik dari letak geografis sebagai wilayah pertanian dan juga mayoritas sebagian besar

penduduk Desa Tulungrejo yang bekerja di sektor pertanian di setiap dusunya, hal tersebut dapat terlihat dari data Kelompok Tani di Desa Tulungrejo sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Kelompok Tani di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang

No	Nama Kelompok Tani	No. Registrasi	Alamat Sekertaris
1	Rukun Makmur I	411.61/13/421.207.103/1981/2010	Jabon 4
2	Rukun Makmur II	411.61/14/421.207.103/1980/2010	Sayang 4/3
3	Rukun Makmur III	411.61/15/421.207.103/1995/2010	Gagar 7/7
4	Bina Usaha	411.61/16/421.207.103/2008/2010	Ganten 20
5	Rukun Makmur	411.61/17/421.207.103/2009/2010	Tulungrejo
6	Tani Makmur	411.61/18/421.207.103/2009/2010	Tulungrejo

Sumber: Data Skunder Desa Tulungrejo, 2012

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Tulungrejo mayoritas bekerja disektor pertanian dan tergabung dalam kelompok tani di setiap dusun, mulai dari Dusun Gagar, Jabon, Sayang, dan Dusun Ganten untuk mendukung kegiatan potensi pertanian yang dimiliki dan tentu saja dengan tujuan

untuk mendorong dan meningkatkan produksi pertanian mereka. Pernyataan tersebut senada dengan wawancara pada Perangkat Desa Tulungrejo Bp. Suwoto sebagai berikut:

“Di Desa Tulungrejo ini semua petani tergabung dalam kelompok tani mas, setiap dusun memiliki kelompok tani masing-masing, ya Rukun Makmur itu, nah yang mengurus masalah pertanian ini pak Suprayitno, beliau yang mengkoordinir gapoktan di Desa Tulungrejo ini, jadi biasanya ada pertemuan kelompok tani di setiap dusun untuk membicarakan perkembangan pertanian termasuk juga masalah GP3K mas”. (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB)

Sementara itu, di sisi pemerintah, faktor yang melatarbelakangi program GP3K ini adalah usaha pemerintah untuk mencapai Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Tujuan dari program kemitraan GP3K ini adalah mendorong produktivitas padi, jagung dan kedelai petani pada tingkat frontier (terdepan) melalui penyediaan paket teknologi, model, saprodi sesuai dengan kalender tanam dan jaminan harga. Petani peserta GP3K di Desa Tulungrejo ini diharapkan mampu mengaplikasikan paket teknologi dari PT. Pertani (Persero) serta benar dalam kegiatan usahatani sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan yang diperoleh.

Dari keseluruhan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang menjalin kerjasama kemitraan GP3K dengan PT. Pertani (Persero). Program kemitraan ini sendiri baru berlangsung pada tahap satu, atau baru pertama menjalin sinergi

program kemitraan tersebut. Sedangkan yang menjadi pelopor terjalinya kerjasama GP3K ini adalah Kelompok tani Rukun Makmur III dan sejauh ini sudah memperlihatkan hasil yang memuaskan, dimana produksi hasil panen petani meningkat menjadi 5 ton per hektare setelah mengaplikasikan sarana produksi pertanian dari PT. Pertani (Persero) serta di pantau langsung oleh petugas lapangan atau *spot worker* dalam setiap tahap pelaksanaan usaha tani. Sehingga dari kerjasama ini, tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani di Desa Tulungrejo menjadi lebih baik lagi.

d. Output sinergi

Pelaksanaan Kemitraan yang dilaksanakan antara PT Pertani (Persero) dengan petani mitra pada dasarnya merupakan proyek sosial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi semua aktor yang terlibat yaitu PT. Pertani (Persero) maupun bagi petani mitra itu sendiri. PT. Pertani (Persero) melakukan kemitraan dengan tujuan untuk memasarkan produk dari perusahaan dengan melakukan program kemitraan. Sedangkan petani mengadakan kemitraan karena membutuhkan sarana produksi yang disediakan oleh PT. Pertani. Oleh karena itu kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar. Pola kemitraan yang dibangun oleh PT. Pertani (Persero)

adalah pola kemitraan Oprasional Kemitraan Agribisnis (KOA), yaitu merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra.

Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudiyakan suatu komoditas pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Seperti penjelasan sebelumnya, Program Kemitraan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang merupakan sinergi BUMN dengan petani ini dilaksanakan dalam rangka menunjukkan peran BUMN dalam penguatan Ketahanan Pangan Nasional sesuai dengan Peratuarn Presiden Nomor 14 tahun 2011. Oleh karena itu, output yang dihasilkan tentu akan menguntungkan pihak yang beritra baik itu PT. Pertani (Persero), petani mitra, maupun pemerintah yang diuntungkan dengan peningkatan pasokan pangan nasional dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, diketahui bahwa kemitraan yang diterapkan oleh PT. Pertani (Persero) merupakan suatu bentuk kerjasama formal. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa terdapat kontrak tertulis dan perjanjian legal. Kontrak yang dilakukan mulai dari penanaman sampai dengan pelunasan kredit. PT. Pertani (Persero) merupakan perusahaan yang membutuhkan mitra

untuk memasarkan produknya sedangkan petani mitra juga membutuhkan pinjaman/kredit untuk menjalankan usaha tani yang dilakukannya. Sehingga baik petani mitra maupun PT. Pertani (Persero) berusaha untuk selalu saling menguntungkan agar sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari kemitraan antara Pemerintah, PT. Pertani dan Petani Mitra terkait implementasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi

a. Faktor Pendukung

1) Sarana dan Prasarana yang mendukung

Salah satu syarat penetapan lokasi dalam pengajuan program kemitraan GP3K adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang mencakup aspek sebagai berikut :

- 1) Berada disekitar basis bisnis PT Pertani Cabang Pemasaran.
- 2) Kondisi lahan cukup bagus dan memenuhi persyaratan secara teknis untuk melakukan budidaya tanaman yang baik.
- 3) Lokasi mudah terjangkau oleh transportasi.
- 4) Luas areal lahan harus mengacu kepada kemampuan daya tampung PT Pertani (Persero) dan Mitra pengadaan yang telah disiapkan sebelumnya.

- 5) Komoditas yang ditanam pada lokasi yang sudah ditetapkan dengan musim tanam atau potensi lahan serta kepentingan PT Pertani (Persero)

Dari semua aspek diatas, penetapan lokasi kemitraan di Desa Tulungrejo sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bahkan dalam penetapan Kelompok Tani, Desa Tulungrejo juga sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan PT. Pertani (Persero) dalam Program kemitraan GP3K sebagai berikut :

- 1) Kelompok Tani yang akan mengikuti program kemitraan adalah kelompok tani yang sudah mapan secara organisasi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- 2) Kelompok Tani yang diikutkan program kemitraan adalah yang mau menerapkan teknologi budidaya yang benar dan bersedia menggunakan sarana produksi yang disediakan PT Pertani (Persero)
- 3) Penetapan jumlah kelompok tani yang mengikuti program kemitraan mempertimbangkan kemampuan opkup hasil panen baik oleh PT Pertani (Persero) maupun oleh Mitra pengadaan (Bank BRI)
- 4) Prosedur penetapan kelompok tani adalah cabang pemasaran sebagai koordinator lapangan berkoordinasi dengan KCD/PPL.

Hal tersebut berdasarkan fakta dilapangan, dimana dari hasil observasi dan wawancara diperoleh data bahwa Desa Tulungrejo merupakan Desa dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian, dimana dari 779,699 Hektar luas lahan secara keseluruhan, 98,620 Hektarnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan 216.645 Hektar digunakan sebagai ladang atau tegalan. Selain itu petani di Desa Tulungrejo juga sudah tergabung kedalam beberapa kelompok tani yang terdaftar pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Kelompok tani tersebut mewakili setiap Dusun di Desa Tulungrejo, yaitu Dusun Gagar, Jabon, Sayang, dan Ganten.

2) Program berkelanjutan

Sesuai dengan prinsip Program GP3K yaitu memberikan teknis budidaya yang baik melalui sarana produksi pertanian yang berkualitas kepada petani agar petani mitra dapat bertambah pendapatannya, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu dengan adanya kemitraan ini dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dikarenakan adanya kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dari berbagai keuntungan tersebut, maka Program GP3K ini ditetapkan sebagai program berkelanjutan oleh pemerintah, artinya terdapat Pengembangan program setelah kerjasama masuk pada tahap akhir atau setelah masa panen dan pelunasan kredit oleh petani mitra. Program berkelanjutan ini terbentuk oleh berbagai tahapan di setiap musim tanamnya,

dimana dalam setiap tahapan dari musim tanam satu ke musim tanam berikutnya diharapkan area kerjasama PT. Pertani khususnya di Desa Tulungrejo semakin dikembangkan. Hal tersebut perlu dilakuakn agar seluruh petani mitra PT. Pertani (Persero) di Desa Tulungrejo dapat merasakan kemudahan dan keuntungan di setiap masa panen secara terus menerus dan berkelanjutan.

3) Pembiayaan Berbunga Rendah

Program GP3K merupakan pola kemitraan BUMN dengan petani yang sumber dana atau penyandang danaya berasal dari pihak perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Pihak perbankan merupakan pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai pemberi kredit. Dimana program dari pihak perbankan tersebut adalah KKP-E atau Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, yaitu kredit yang diberikan oleh Perbankan yang ditunjuk pemerintah melalui Kelompok Tani atau Koperasi Primer baik untuk kegiatan budidaya tanaman maupun pengadaan. Sedangkan pendanaan atau pembiayaan merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Program Kemitraan yang berasal dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Non Perbankan yang ditunjuk langsung oleh PT Pertani pusat. Dalam program ini PT Pertani pusat menunjuk Bank BRI sebagai sumber dana. Dengan menyediakan pendanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan budidaya kepada petani peserta program kemitraan, maka petani

mitra khususnya di Desa Tulungrejo menjadi terbantu dengan kemudahan yang diberikan, terlebih bunga yang ditawarkan sangat ringan, yaitu hanya 6% per tahun. Hal tersebutlah yang menjadikan petani di Desa Tulungrejo tertarik untuk bermitra dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang.

4) Sarana produksi pertanian berkualitas

Salah satu kelebihan dari Program GP3K yang diterapkan oleh petani mitra khususnya di Desa Tulungrejo adalah mutu sarana produksi pertanian (saprodi) dari PT. Pertani (Persero) yang berkualitas tinggi sehingga dapat menambah jumlah hasil panen secara signifikan menjadi lebih dari 5 ton per hektare, hal tersebut tidak terlepas dari penerapan seluruh paket saprodi yang telah diterapkan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Daftar paket sarana produksi pertanian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel.6 Rencana Paket Saprodi Kemitraan Per Ha.

No	SAPRODI	HARGA (RP)	KWANTUM	SATUAN	RUPIAH
1	Benih Padi Kelas SS	9,500	30	Kg	285,000
2	Bioorganik	1,750	500	Kg	875,000
3	POC	50,000	4	Ltr	200,000
4	NEB	30,000	6	Btl	180,000
5	Furadan	10,500	20	Kg	210,000
6	SP 18	1,800	100	Kg	180,000
7	Urea Subsidi	1,800	150	Kg	270,000
8	NPK Subsidi	2,300	300	Kg	690,000
9	Biaya Garap	1,200,000	1		1,200,000
	BUNGA BANK	6%			
JUMLAH					4,335,400

Sumber: Data PT. Pertani (Persero), 2013

Dengan penerapan produk berkualitas dari PT. Pertani seperti tabel diatas, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian petani di Desa Tulungrejo, selain itu juga menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dari petani peserta program kemitraan dalam jumlah dan waktu yang tepat, hal tersebut dikarenakan produk tersebut didistribusikan langsung oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang ke petani mitra di Desa Tulungrejo.

c. Faktor Penghambat

i. Faktor kondisi alam

Produktifitas pertanian di Desa Tulungrejo bisa dikatakan belum maksimal karena kondisi sebagian besar lahan pertanian berada di lereng perbukitan dan dataran tinggi sehingga menyulitkan proses irigasi, serta kondisi kesuburan tanah di Desa Tulungrejo masih di bawah Desa-deso lain di Kecamatan Ngantang terutama yang berada di sekitar wilayah waduk Selorejo, hal terebut sesuai dengan pernyataan Bp. Imam selaku Kaur umum Desa Tulungrejo yang merangkap Kuwowo (Pemantau irigasi) dalam petikan wawancara sebagai berikut:

“Bisa dibilang masalah utama petani di Tulungrejo saat ini ada pada sistem irigasinya, soalnya wilayah pertanian disini banyak yang di dataran tinggi. Jadi kita ngambil sumber air cuma mengandalkan dari mata air, apalagi setelah erupsi kelud tanggal 13 Februari 2014 kemarin. Total ada 12 titik sumber air yang rusak. Di Dusun Jabon ada 5 titik, di Bayan ada 3, nah di dusun Gagar sendiri ada 4 titik. Jadi

setelah erupsi kelud kita cuma berharap dari air hujan, karena aliran irigasinya tersendat material vulkanik, syukurnya sekarang ini lagi musim hujan” (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2014 pukul 10.30 WIB)

Selain masalah irigasi, faktor kesuburan tanah juga cukup mempengaruhi walaupun tidak dominan, seperti pernyataan Bp. Wardi selaku Ketua Kelompok tani Rukun Makmur III sebagai berikut:

“Disini kalau panen 1 hektare bisa sampai 5 ton, itupun sejak kita pakai benih padi Ciherang dari PT. Pertani. Dulu pas beli saprodi di toko pertanian ya masih dibawah itu, soalnya disini tanahnya tidak sebagus di wilyah lain, apalagi didekat waduk selorejo, yang saya tahu disana itu bisa sampai 6 sampai 7 ton per hektare, soalnya di sana kan tanahnya bagus, jadi bisa buat tanam padi atau sayuran secara bergantian, kalau di Tulungrejo ini kebanyakan padi semua mas, soalnya selain dijual, hasilnya juga bisa di konsumsi sendiri. (Wawancara pada tanggal 3 April 2014 pukul 10.00)

Dari petikan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa produktifitas pertanian di Tulungrejo terhambat oleh faktor alam seperti kondisi geografis dan sistem irigasi, terlebih setelah erupsi gunung kelud pada 13 februari 2014. Namun dari hasil penelitian di lapangan, kondisi tersebut dapat diminimalisir melalui implementasi Program GP3K, karena sarana produksi (saprodi) yang di aplikasikan petani benar-benar bermutu tinggi dan sudah dijamin oleh pemerintah serta di pantau langsung oleh petugas lapangan (spot worker) dari PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang dalam pengaplikasian produk dari proses tanam hingga panen.

- ii. Nilai jual dibawah standar pemerintah

Di Desa Tulungrejo, nilai jual produk pertanian dari petani bisa dibilang masih rendah, karena hampir seluruh petani di Desa Tulungrejo menjual hasil panen langsung ke pengepul yang menawarkan harga gabah dibawah standar dari ketetapan pemerintah. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Bp. Suprayitno selaku Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Desa Tulungrejo sebagai berikut:

“Kalau musim panen petani kita biasanya jual hasilnya ke pengepul. Harganya memang masih dibawah ketetapan pemerintah, tapi ya mau gimana lagi, mereka kan juga mau cari untung. Selama perbedaan harganya masih wajar kita sih tidak ada masalah. Lagi pula petani kita sudah terbiasa menjual hasil panen ke pengepul yang datang langsung ke lokasi sawah-sawah warga, jadi kita tidak perlu susah-susah menjualnya keluar” (Wawancara pada tanggal 3 April 2014 pukul 09.30 WIB)

Permasalahan penjual hasil pertanian yang masih di kuasai pengepul atau tengkulak memang menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, pasalnya petani di seluruh Indonesia sudah seharusnya mendapat jaminan ketika panen tiba, karena sudah diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bahkan dalam sistem kemitraan GP3K yang dicanangkan Kementrian BUMN sektor pertanian, masalah penjualan hasil panen juga sudah diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara BUMN pelaksana dengan petani mitranya, artinya BUMN pelaksana, dalam hal ini PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang seharusnya juga terlibat dalam hal pembelian hasil panen petani mitranya, untuk kemudian di tampung ke gudang-gudang perusahaan PT. Pertani. Namun, hal

ini belum dapat terealisasi karena, PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang tidak memiliki fasilitas gudang yang mencukupi, dari hasil pantauan di lapangan, peneliti mendapatkan bahwa PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang hanya memiliki tiga buah gudang, itupun yang digunakan hanya satu sebagai tempat penyimpanan dan pengemasan produk sarana produksi (saprodi) PT. Pertani (Persero), sedangkan sisanya disewakan kepada pihak lain.

iii. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan GP3K

Salah satu kewajiban PT. Pertani (Persero) dalam menjalankan program korporasi GP3K dengan petani mitranya adalah dengan melakukan sosialisasi secara rutin dan berkala dalam memantau proses usaha tani yang dilakukan petani mulai dari awal penanaman hingga panen, proses sosialisasi tersebut dimaksudkan agar petani dapat mengaplikasikan saprodi pertanian PT. Pertani (Persero) secara benar, serta menjalankan usaha taniya dengan baik agar diperoleh hasil yang maksimal. Namun seiring dengan semakin bertambahnya petani yang bermitra dengan PT. Pertani, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, area tugas *spot worker* (petugas lapangan) dari PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang juga semakin bertambah, sedangkan jumlah petugasnya tetap, hal tersebut tentu mempengaruhi kualitas pelayanan kepada petani mitra. Hal tersebut sesuai dengan fakta di lapangan, seperti yang tertera

dalam petikan wawancara Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur III, Bp.

Wardi sebagai berikut:

“Kalau sosialisasi program GP3K di Rukun Makmur ini ya cuma awal-awal dulu aja yang sering mas, kalau sudah masuk masa tanam kayak gini kitakan hanya mengaplikasikan saprodi kayak biasanya. Jadi waktu pertama kali mengajukan kerjasama dulu, kita diberi penjelasan tentang mekanisme program serta dasar-dasar usaha tani yang baik dan benar dengan saprodi berkualitas dari PT. Pertani. Setelah itu kita ya tinggal menjalankan seperti biasanya, kalau sekarang spot worker kesini sudah jarang mas, terakhir sudah beberapa minggu yang lalu datang, tapi ya cuma lihat-lihat hasil perkembangan sama penagihan kredit GP3K”. (Wawancara pada tanggal 3 April 2014 pukul 10.00 WIB)

Dari petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja petugas lapangan (spot worker) PT. Pertani (Persero) belum maksimal terutama dalam hal pengawasan atau sosialisasi langsung kepada petani mitra, hal tersebut dikarenakan jumlah petugas *spot worker* yang masih terbatas sementara harus mengawasi wilayah area pemasaran PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang yang sangat luas.

iv. Faktor ekonomi;

Dalam mekanisme Pembiayaan atau Permodalan Program GP3K, diketahui bahwa sumber pembiayaan untuk kegiatan budidaya (*on farm*) berasal dari program KKP-E. Program KKP-E sendiri merupakan kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui kelompok tani atau koperasi primer baik untuk kegiatan budidaya tanaman maupun pengadaan. Waktu pengambilan

pinjaman kredit beserta bunganya sering terhambat karena petani mempunyai sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga terpaksa menggunakan dana pengembalian pinjaman, selain itu pengembalian kredit terkadang juga terhambat karena adanya serangan hama maupun bencana seperti erupsi gunung kelud yang melanda Desa Tulungrejo sehingga ada keterlambatan pelunasan kredit. Hal tersebut seperti pernyataan Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur III, Bpk Wardi sebagai berikut:

“Untuk masalah pembayaran kredit saya akui memang masih menjadi beban buat kita, masalahnya kita kan butuh biaya banyak untuk memenuhi kebutuhan, apalagi kemarin itu lahan kita banyak yang rusak akibat erupsi kelud. Tapi ya Alhamdulillah dampaknya tidak terlalu fatal sampai gagal panen. Untungnya pihak PT. Pertani mau mengerti dan memahami kondisi petani di sini, jadi untuk pelunasan kredit kemarin kita di beri keringanan waktu sampai bulan Juli atau Agustus depan” (Wawancara pada tanggal 3 April 2014 pukul 10.00 WIB)

Untuk mengatasi hal yang tidak terduga seperti gangguan hama dan bencana alam seperti kasus di Desa Tulungrejo ini, PT. Pertani (Persero) memang sudah menetapkan ketentuan seperti yang tercantum dalam Prosedur Program GP3K, dimana tertulis bahwa apabila pada saat proses hingga panen produksi mengalami gangguan hama dan penyakit atau faktor alam lainnya, maka pelunasan pinjaman bisa dilunasi pada saat panen musim berikutnya dengan catatan ada foto dokumentasi dan berita acara dari PPL/PHT/Mantri Tani/Dinas terkait.

- **Analisis dan Pembahasan**

1. Sinergi PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)

- a. Bentuk Sinergi

Untuk mencapai Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 ditempuh dua strategi, yaitu peningkatan produksi dan penurunan konsumsi beras. Dalam rangka peningkatan produksi, strategi yang ditempuh adalah peningkatan produktivitas, perluasan areal dan pengelolaan lahan, serta penurunan konsumsi beras dalam rangka diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Ada beberapa program kegiatan yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya yang dilakukan kementerian pertanian yang didukung Kementerian BUMN melalui Program Kemitraan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). GP3K merupakan kegiatan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kelompok tani binaan dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Salah satu BUMN yang melakukan program ini adalah PT. Pertani (Persero). Melalui GP3K diharapkan adanya hubungan saling menguntungkan dimana PT. Pertani (Persero) memberikan kemudahan berupa pinjaman modal (pembiayaan) dan paket sarana produksi pertanian, teknologi budidaya, teknologi pasca panen dan menjamin pemasaran hasil produksi dari program kemitraan. Sedangkan petani akan melaksanakan program budidaya penanaman sesuai yang

direkomendasikan dengan menggunakan paket sarana produksi dari PT. Pertani (Persero) dan akan menjamin pinjaman atas sarana produksi tersebut dengan hasil panenya. Pola kemitraan ini diharapkan menunjang pembangunan di sektor pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang mengikuti program kemitraan GP3K dari PT. Pertani (Persero) untuk pengembangan tanaman padi. Melalui penerapan Program GP3K, petani di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang diharapkan akan mampu mengembangkan usaha taninya, hal tersebut tentu akan bermanfaat bagi terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani khususnya di daerah tersebut. Menurut Darmawan (2012:22) permasalahan besar yang selama ini dihadapi petani di Indonesia adalah sulitnya sumber pendanaan (modal), kelangkaan sarana produksi dan hambatan pemasaran hasil pertaniannya. Modal yang dimiliki sebagian besar petani dalam mengusahakan pertanian relatif kecil, meskipun harga dasar gabah selalu naik setiap tahun menjelang masa tanam, tetapi kenaikan ini hampir selalu tidak cukup untuk mempertahankan kelangsungan usaha tani produsen padi. Hal ini menyebabkan rendahnya pendapatan petani dan kemampuan untuk menyimpan atau menabung uang dari hasil pertaniannya sangat kecil bahkan tidak ada, sehingga kesempatan untuk memperluas usahanya juga terbatas. Seiring rencana kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi pupuk, juga membuat petani sulit mendapatkan sarana

produksi yang tepat waktu, jenis, mutu, tempat, dan harga. Ditambah lagi, petani juga terkendala dipemasaran hasil produksi sehingga ketika panen raya harga produk malah turun. Permasalahan-permasalahan diatas tentunya akan menghambat pemerintah dalam mewujudkan surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 ini. Melalui kementerian BUMN, pemerintah berupaya meningkatkan produksi pangan terutama padi melalui prograam kemitraan GP3K., sehingga pendapatan petani juga meningkat. Diharapkan dengan adanya program tersebut, mampu meningkatkan produksi padi di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang yang belum optimal melalui paket sarana produksi yang tersedia. Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga diperoleh output dan manfaat yang optimal.

Program GP3K ini merupakan pola kemitraan BUMN dengan petani yang sistem pembayarannya menguunakan pola yarnen, yaitu seluruh kebutuhan sarana produksi petani dibantu dalam bentuk natural dan dikembalikan pada saat panen. Sedangkan sumber dana atau penyanggand dana dari program GP3K adalah pihak perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Pihak perbankan merupakan pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai pemberi kredit. Dimana program dari pihak perbankan tersebut adalah KKP-E atau Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, yaitu kredit yang diberikan oleh Perbankan yang ditunjuk pemerintah melalui Kelompok Tani atau Koperasi Primer baik untuk kegiatan budidaya tanaman maupun pengadaan. Sedangkan pendanaan atau

pembiayaan merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Program Kemitraan yang berasal dari Lembaga Keuangan Perbankan atau Non Perbankan yang ditunjuk langsung oleh PT Pertani pusat. Dalam program ini PT Pertani pusat menunjuk Bank BRI sebagai sumber dana.

b. Peran Aktor Pelaksana

Menurut Djajanto (2011:9) “Program GP3K merupakan suatu upaya untuk melibatkan dunia korporasi dalam mempersiapkan program ketahanan pangan, dimana masalah ketahanan pangan bukan selamanya didominasi pemerintah, namun melibatkan seluruh *stakeholder*, termasuk dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah daerah”. Adanya sinergi tersebut tentu tidak terlepas dari konsep *Good Governance* dimana *United Nations Development Program* (UNDP) mengartikan bahwa *Good Governance* merupakan hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara (*State*) sektor swasta (*Private Sector*) dan masyarakat (*Society*). Oleh karena itu, sinergi yang baik dari semua aktor *governance* sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program kemitraan GP3K. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Darmawan (2012:12) sebagai berikut:

“Program kemitraan GP3K merupakan suatu bentuk sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani. BUMN membantu masalah pembiayaan petani melalui dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Prosesnya tidak serumit meminjam dana di bank karena itu merupakan dana CSR perusahaan. Bunga pinjamannya pun rendah, hanya 6%. Lalu ada juga KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi) yang pelaksanaannya adalah perbankan nasional. Kemudian petani juga mendapatkan sarana produksi yang berkualitas dan original, karena

penyaluranya terjamin. Sehingga pemerintah diuntungkan dengan peningkatan produktivitas petani hingga mencapai 1-2 ton per hektar. Sehingga akan tercapai swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional”.

Sistem kemitraan GP3K antara PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang dan petani mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sendiri termasuk dalam Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Menurut Sumardjo dkk (dalam Prasticha, 2013:15) pola kemitraan KOA merupakan hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Disamping itu, perusahaan mitrajuga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Dalam hal ini PT. Pertani (Persero) menyediakan pinjaman paket produksi dengan teknologi usahatani berupa pupuk produksi PT. Pertani (Persero), benih atau biaya benih, biaya pupuk lain, biaya garap dengan bunga pinjaman yang rendah serta jaminan pasar terhadap gabah yang diproduksi petani. Sedangkan untuk sarana produksi berupa uang tunai diberikan oleh pihak bank pelaksana yaitu Bank BRI. (Prasticha, 2013:57)

Secara rinci, peran aktor pelaksana baik dari PT. Pertani (Persero) maupun petani mitra dalam pelaksanaan kegiatan program kemitraan GP3K pada usaha tani padi di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang adalah sebagai berikut:

1) Tahap persiapan

Dalam kegiatan persiapan program kemitraan GP3K, PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang melakukan beberapa pertemuan , yaitu:

a) Pertemuan I

Pertemuan pertama merupakan sosialisasi yang dilakukan pada pertemuan rutin kelompok tani yang dihadiri oleh petugas lapangan (*spot worker*) dari PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang, anggota kelompok tani dan Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) setempat. Materi yang diberikan antara lain mengenai komoditas yang akan diusahakan yaitu padi dan hal-hal menyangkut Program GP3K baik persyaratan serta ketentuan yang harus dijalani kelompok tani yang menjadi peserta GP3K PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang serta peran masing-masing pihak dalam program kemitraan GP3K. Petani yang berminat kemudian didata oleh petugas mengenai identitas dan luasan lahan yang akan diikuti program GP3K dan selanjutnya dikoordinir oleh ketua kelompok tani untuk mengumpulkan persyaratan kemitraan GP3K yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berlaku.

b) Pertemuan II

Setelah kegiatan sosialisasi pada pertemuan pertama, dilakukan pertemuan kedua untuk penandatanganan surat yang berhubungan dengan kemitraan GP3K diantaranya Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK),

surat pengajuan kredit, surat kuasa dan perjanjian kemitraan. Surat-surat tersebut nantinya akan digunakan untuk proses pengajuan dana dan sarana produksi. Pertemuan ini dihadiri petugas PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang, ketua kelompok tani, dan PPL

c) Pertemuan III

Pertemuan ketiga merupakan pertemuan yang dimaksudkan untuk pencairan dana dan pembagian sarana produksi dari PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang sesuai dengan Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah diajukan serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang dan kwitansi penyerahan dana, sehingga setiap petani yang mengikuti program kemitraan GP3K diwajibkan datang. Selain itu, Petugas PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang juga memberikan bimbingan teknis penerapan teknologi baru dari paket sarana produksinya pada usaha tani padi agar petani mampu menghasilkan gabah atau beras yang berkualitas dan berkuantitas tinggi, sehingga PPL juga diusahakan hadir nantinya dalam membantu petani. Adapun produk dari PT. Pertani (Persero) yang harus diaplikasikan oleh petani peserta GP3K adalah pupuk Organik Granul (POG) Biorganik, Pupuk Organik Cair (POC) Bintang Kuda Laut dan NEB Strong Up Booster Urea

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, bimbingan dan pendampingan oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang tidak diberikan secara menyeluruh dari tahap persiapan tanam, pemeliharaan hingga panen. untuk varietas benih padi, PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang tidak menentukan jenis atau varietas jenis padi yang harus ditanam. Hal ini disebabkan karena petani lebih mengetahui varietas apa yang cocok dan biasanya ditanam oleh mereka. Hanya saja PT. Pertani (Persero) menyarankan agar petani menggunakan benih unggul dan bersertifikasi serta pengaplikasian sesuai prosedur.

Masalah-masalah yang dihadapi di lapangan pada tahap pelaksanaan diantaranya, mengenai pengaplikasian teknologi paket sarana produksi. Beberapa petani salah dalam mengaplikasikan pupuk baik dari segi waktu dan cara pengaplikasiannya. Hal ini disebabkan petani tidak mengikuti bimbingan atau pertemuan kelompok tani dan enggan untuk bertanya pada PPL dan ketua kelompok taninya. Berdasarkan Pasal 2 yang tercantum pada Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan untuk Budidaya Tanaman Pangan, pihak PT. Pertani (Persero) wajib membeli gabah atau hasil panen petani atas pertanaman dari areal yang diikuti program sesuai dengan kesepakatan harga kedua belah pihak. Namun karena belum siapnya pergudangan untuk menyimpan hasil panen dari pihak PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang, maka pembayaran GP3K pada tahap I masih dalam bentuk uang tunai.

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam program kemitraan GP3K dilakukan untuk mengikuti, mengetahui kemajuan pencapaian tujuan ataupun sasaran serta memberikan upan balik pada upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam program kemitraan GP3K dengan melakukan kunjungan langsung ke lahan petani peserta GP3K dan tanya jawab dengan PPL, ketua kelompok tani maupun petani peserta GP3K. Sifat dari kegiatan ini lebih sebagai alat kontrol dan perbaikan pelaksanaan program kemitraan GP3K pada tahap selanjutnya.

4) Tahap Penagihan atau Pengembalian Pinjaman

Jangka waktu kontrak kemitraan GP3K adalah salah satu musim tanam atau dihitung lima bulan. Pembayaran pinjaman dilakukan setelah panen hasil pertanaman. Setelah panen selesai, pihak PT. Pertanian (persero) dan petani mitra kembali melakukan pertemuan yang bertujuan untuk penagihan dan pelunasan atau pengembalian pinjaman paket sarana produksi GP3K. Jangka pinjaman ini dapat diperpanjang, dengan ketentuan bunga yang tetap berjalan, yaitu 0,5% per bulan.

Kemitraan agribisnis berdasarkan pada persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan petani mitra oleh perusahaan mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu hubungan yang saling memerlukan dalam arti perusahaan mitra memerlukan pasokan bahan baku dan kelompok

mitra memerlukan bimbingan dan penambahan hasil, saling memperkuat dalam arti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra bersama-sama memperhatikan kedudukan masing-masing dalam meningkatkan daya saing usahanya dan saling menguntungkan yaitu baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan dan kesinambungan usaha.

c. Implementasi Program

Kemitraan antara petani di Desa Tulungrejo dan PT. Pertani (Persero) termasuk pada pola kemitraan Kerjasama Oprasional Agribisnis (KOA) dan merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra, dalam hal ini Kelompok Tani Rukun Makmur berperan dalam menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Di samping itu, perusahaan mitra juga sering berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Dimana PT. Pertani (Persero) sebagai perusahaan mitra menyediakan sarana produksi berupa benih, pupuk organik cair (POC), NEB dan Bioorganik serta menyediakan biaya garap sebagai modal untuk melakukan budidaya tanaman padi. Sedangkan para petani mitra atau kelompok mitra berperan untuk memberikan atau menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja.

Keunggulan dari sistem Kemitraan Kerjasama Oprasional Agribisnis (KOA) diantaranya adalah tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan serta terciptanya peningkatan usaha karena adanya pembinaan dari perusahaan mitra. Dalam hal ini, PT. Pertani (Persero) membutuhkan petani mitra untuk mengaplikasikan produknya melalui program kemitraan sehingga pengeluaran produk PT. Pertani (Persero) semakin besar. Disamping itu petani juga mendapat keuntungan yaitu dengan adanya bimbingan atau pelatihan dari petugas lapangan PT. Pertani (Persero) atau yang biasa disebut *Spot Worker* dan Petugas Penyuluhan Lapang (PPL) dari Kecamatan Ngantang yang sudah bekerjasama dengan PT. Pertani (Persero). Pelatihan dalam bidang pertanian yang dimaksudkan yaitu pelatihan dalam bidang pertanian yang diberikan oleh perusahaan mitra kepada petani mitra melalui pembinaan teknologi pangan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Petani di Desa Tulungrejo yang menjadi petani mitra secara administrasi dan keorganisasian yaitu petani yang diwakili oleh seorang ketua kelompok. Ketua kelompok dan pengurus kelompok tani bertanggung jawab untuk menandatangani dan melakukan kesepakatan dengan PT Pertani (Persero) secara hukum karena penandatanganan kerjasama kemitraan dilakukan oleh ketua kelompok dan pengurus kelompok tani. Dalam penelitian ini, Kelompok Tani yang menjadi obyek penelitian adalah Kelompok Tani Rukun Makmur III yang dipimpin oleh Bapak Wardi.

Ketua kelompok dan pengurus bertanggung jawab kepada petani-petani anggota untuk memberikan bimbingan dan arahan mengenai isi kontrak yang didalamnya tercantum hak dan kewajiban petani mitra. Selain itu pula pada awalnya dari pihak PT Pertani (Persero) ketua kelompok harus memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atau surat berharga (BPKB) atau minimal senilai dengan jumlah pinjaman atau kredit kepada perusahaan, namun hal ini dibatalkan karena dianggap akan memberatkan petani mitra. Sedangkan petani-petani anggota juga tidak perlu memberikan jaminan apapun kepada perusahaan. Hal ini tersebut sesuai dengan petikan wawancara dengan Bp. Wardi selaku Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur III sebagai berikut:

“sebenarnya kalau mau mengajukan kredit saprodi ke PT. Pertani itu setahau saya harus memberikan jaminan, entah itu sertifikat tanah atau BPKB motor dsb, tapi kalau untuk kelompok tani kami ya itu banyak yang keberatan mas, apalagi rata-rata kita disini kan masih susah, la wong kita ini cuma petani kecil. Untungnya dari PT. Pertani memberi kemudahan, jadi ya tidak usah pakai jaminan-jaminan itu, yang penting modalnya saling percaya mas, alhamdulillah sejauh ini kerjasama kita masih lancar dan hasilnya memuaskan”. (Wawancara pada tanggal 3 April 2014 pukul 10.00 WIB)

Terlepas dari masalah tidak adanya jaminan dalam kerjasama diatas, PT. Pertani (Persero) tetap harus melaksanakan kewajibanya secara optimal sebagai wujud pengabdian BUMN untuk masyarakat. Diantaranya melalui bimbingan atau sosialisasi yang memungkinkan petani untuk lebih optimal lagi dalam penggarapan lahan milik mereka, hal tersebut dikarenakan apabila ada permasalahan langsung bisa dikonsultasikan dan dipecahkan bersama-sama

dengan *Spot Worker* maupun PPL melalui pertemuan rutin. Keuntungan lain dari adanya kemitraan ini adalah peningkatan usaha. Dengan mengaplikasikan seluruh produk dari PT Pertani (Persero) maka panen juga akan lebih banyak, dikarenakan produk dari PT Pertani (Persero) tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Apabila program kemitraan dapat berjalan dengan baik secara terus menerus, otomatis akan memenuhi target dari PT Pertani (Persero) maupun dari pihak perbankan dimana mereka mempunyai indikator keberhasilan dari sebuah program. Antara lain :

- 1) Pendapatan petani peserta program kemitraan meningkat
- 2) Jumlah petani peserta kemitraan sesuai target
- 3) Tingkat harga dan hasil panen yang diterima petani peserta program kemitraan cukup baik
- 4) Seluruh hasil panen petani mitra terserap oleh pasar
- 5) Berkembangnya kegiatan usaha tani lainnya dilokasi kemitraan
- 6) Meningkatnya omzet penjualan PT Pertani (Persero), yaitu berupa sarana produksi, beras dan komoditas hasil pertanian lainnya

Apabila indikator tersebut dapat tercapai, maka tidak hanya satu pihak yang diuntungkan, namun semua aktor *governance* yang terlibat akan memperoleh hasil positif, mulai dari petani sendiri, BUMN pelaksana, pihak

perbankan, bahkan pemerintah yang telah dibantu dalam hal pencapaian target pemenuhan pasokan pangan nasional.

d. *Output Sinergi*

Program kemitraan yang dijalankan oleh PT Pertani (Persero) selaku BUMN adalah Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) yang merupakan sinergi BUMN dengan Petani. Program ini dilaksanakan dalam rangka menunjukkan peran BUMN dalam penguatan Ketahanan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 14 Tahun 2011.

Tujuan Program :

Mendorong produktivitas padi, jagung, dan kedelai petani pada tingkat frontier (terdepan) melalui penyediaan paket teknologi, modal, saprodi, sesuai dengan kalender tanam dan jaminan harga.

Manfaat Program :

- 1) Melaksanakan Visi BUMN sebagai alat untuk kesejahteraan melalui sistem kemitraan
- 2) Meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan usaha tani melalui pendekatan Kemitraan agar pendapatan petani bertambah
- 3) Bertambahnya kapasitas produksi pangan nasional dan aktivitas ekonomi pedesaan
- 4) Menekan inflasi

Berdasarkan tujuan dan manfaat tersebut sesuai dengan tujuan dari kemitraan yang dikemukakan oleh Hafsah (1999) yaitu meningkatkan pendapatan

usaha kecil dan masyarakat serta meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Dengan kemitraan dengan PT Pertani (Persero) diharapkan petani mitra dapat bertambah pendapatannya. Sehingga secara tidak langsung petani mitra taraf hidupnya akan meningkat. Selain itu dengan adanya kemitraan ini dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dikarenakan adanya kerja sama yang saling bergantung. Seperti termaktup dalam inti dari tujuan sebuah kemitraan yakni “Win-win solution partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih menguntungkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Kemitraan antara PT. Pertani (Persero) dengan petani mitra sudah memenuhi beberapa prinsip kemitraan. Seperti yang telah diketahui prinsip-prinsip kemitraan memerlukan beberapa syarat-syarat, yaitu :

- 1) Saling pengertian (*common understanding*)

Prinsip saling pengertian ini dikembangkan dengan cara meningkatkan pemahaman yang sama mengenai lingkungan, permasalahan lingkungan, serta peranan masing-masing komponen. Selain aspek lingkungan yang mungkin sangat baru bagi para pelaku pembangunan, juga pemahaman diri mengenai fungsi dan peranan masing-masing aktor penting. Artinya masing-masing aktor harus dapat memahami kondisi dan posisi komponen yang lain, baik

pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaan kemitraan PT. Pertani (Persero) selaku perusahaan mitra mengetahui fungsi dan peran dari petani mitra. Antara lain ketika terjadi keterlambatan pengembalian kredit kemitraan. Dari pihak PT Pertani (Persero) akan memberikan penundaan pembayaran kredit kemitraan. Sedangkan para petani dalam sebuah kelompok juga memahami perannya masing-masing, dimana petani mitra dalam hal ini harus mengaplikasikan seluruh produk mitra. Maka petani mitra telah mengaplikasikan seluruh produknya. Meskipun ada beberapa petani yang melanggar kesepakatan tersebut.

2) Kesepakatan bersama (*mutual agreement*)

Kesepakatan adalah aspek yang penting sebagai tahap awal dari suatu kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan ini hanya dapat diraih dengan adanya saling pengertian seperti yang disebutkan diatas. Hak ini merupakan dasar-dasar untuk dapat saling mempercayai dan saling memberi diantara para pihak yang bersangkutan. Kesepakatan antara PT Pertani (Persero) dan petani mitra ini berkaitan pula dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dimana dalam hal ini terjadi kesepakatan kerjasama untuk membudidayakan tanaman pangan. Pihak perusahaan sebagai penyedia modal, sarana, teknologi dan saprodi harus memberikan seluruh hak dari petani mitra tersebut sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan petani mitra juga sepakat untuk mengaplikasikan seluruh produk sesuai dengan kontrak kemitraan.

3) Tindakan bersama (*collective action*)

Tindakan bersama ini adalah tekad bersama-sama untuk mengembangkan kepedulian lingkungan. Cara yang dilakukan tentu berbeda anatara pihak yang satu dengan pihak yang lain akan tetapi tujuannya sama yaitu melindungi lingkungan dari kerusakan. Hal ini merupakan tujuan dari penggunaan prinsip-prinsip kemitraan. Dalam kemitraan antara kedua belah pihak kepedulian terhadap lingkungan ini diwujudkan dengan pemakaian produk dari PT. Pertani (Persero) yang keseluruhannya organik dan petani mitra mau dan mampu nuntut mengaplikasikan produk organik. Hal ini disebabkan oleh pola pikir petani yang cenderung mulai paham dengan pentingnya produk organik untuk produk yang mereka hasilkan. Sehingga hal ini dapat membantu pemulihan lingkungan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka sesuai dengan kepentingan usaha masing-masing baik secara ekonomis maupun ekologis bukan sebaliknya. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan akan memberikan jaminan kepentingan hakiki mereka. Kepentingan hakiki tersebut berupa kualitas hidup yang makin meningkat dan kelestarian fungsi lingkungan (sumber daya alam). Secara keseluruhan kemitraan antara PT. Pertani (Persero) dengan petani mitra ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang ada. Selain itu petani mitra juga menganggap peranan kemitraan terhadap keberlangsungan

usaha penting karena dapat menghasilkan manfaat timbal balik bagi petani maupun PT Pertani (Persero).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari kemitraan antara Pemerintah, PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra terkait implementasi Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi

a. Faktor Pendukung

1) Sarana dan Prasarana yang mendukung

Salah satu syarat penetapan lokasi dalam pengajuan program kemitraan GP3K adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang mencakup berbagai aspek seperti Lokasi yang strategis dan berada di wilayah area manager PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang, kondisi lahan cukup bagus dan memenuhi persyaratan secara teknis untuk melakukan budidaya tanaman yang baik, luas areal lahan yang ideal, dan sebagainya. Dari semua aspek yang harus dipenuhi tersebut, penetapan lokasi kemitraan di Desa Tulungrejo sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bahkan dalam penetapan Kelompok Tani, Desa Tulungrejo juga sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan PT. Pertani (Persero) dalam Program kemitraan GP3K seperti Kelompok Tani yang akan mengikuti program kemitraan adalah kelompok tani yang sudah mapan secara organisasi dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian, kelompok tani yang diikutkan program kemitraan adalah

yang mau menerapkan teknologi budidaya yang benar dan bersedia menggunakan sarana produksi yang disediakan PT Pertani (Persero), serta prosedur penetapan kelompok tani adalah cabang pemasaran sebagai koordinator lapangan berkoordinasi dengan KCD/PPL. Berdasarkan fakta dilapangan, dimana dari hasil observasi dan wawancara diperoleh data bahwa Desa Tulungrejo merupakan Desa dengan mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian, dimana dari 779,699 Hektar luas lahan secara keseluruhan, 98,620 Hektarnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan 216.645 Hektar digunakan sebagai ladang atau tegalan. Selain itu petani di Desa Tulungrejo juga sudah tergabung kedalam beberapa kelompok tani yang terdaftar pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Kelompok tani tersebut mewakili setiap Dusun di Desa Tulungrejo, yaitu Dusun Gagar, Jabon, Sayang, dan Ganten.

2) Program berkelanjutan

Sesuai dengan prinsip Program GP3K yaitu memberikan teknis budidaya yang baik melalui sarana produksi pertanian yang berkualitas kepada petani agar petani mitra dapat bertambah pendapatannya, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu dengan adanya kemitraan ini dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat dikarenakan adanya kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Dari berbagai keuntungan tersebut, maka Program GP3K ini

ditetapkan sebagai program berkelanjutan oleh pemerintah, artinya terdapat Pengembangan program setelah kerjasama masuk pada tahap akhir atau setelah masa panen dan pelunasan kredit oleh petani mitra. Program berkelanjutan ini terbentuk oleh berbagai tahapan di setiap musim tanamnya, dimana dalam setiap tahapan dari musim tanam satu ke musim tanam berikutnya diharapkan area kerjasama PT. Pertani khususnya di Desa Tulungrejo semakin dikembangkan. Hal tersebut perlu dilakuakn agar seluruh petani mitra PT. Pertani (Persero) di Desa Tulungrejo dapat merasakan kemudahan dan keuntungan di setiap masa panen secara terus menerus dan berkelanjutan.

3) Pembiayaan Berbunga Rendah

Program GP3K merupakan pola kemitraan BUMN dengan petani yang sumber dana atau penyandang danaya berasal dari pihak perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri. Pihak perbankan merupakan pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai pemberi kredit. Dimana program dari pihak perbankan tersebut adalah KKP-E atau Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, yaitu kredit yang diberikan oleh Perbankan yang ditunjuk pemerintah melalui Kelompok Tani atau Koperasi Primer baik untuk kegiatan budidaya tanaman maupun pengadaan. Sedangkan pendanaan atau pembiayaan merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Program Kemitraan yang berasal dari Lembaga Keuangan Perbankan atau

Non Perbankan yang ditunjuk langsung oleh PT Pertani pusat. Dalam program ini PT Pertani pusat menunjuk Bank BRI sebagai sumber dana. Dengan menyediakan pendanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan budidaya kepada petani peserta program kemitraan, maka petani mitra khususnya di Desa Tulungrejo menjadi terbantu dengan kemudahan yang diberikan, terlebih bunga yang ditawarkan sangat ringan, yaitu hanya 6% per tahun. Hal tersebutlah yang menjadikan petani di Desa Tulungrejo tertarik untuk bermitra dengan PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang.

4) Sarana produksi pertanian berkualitas

Salah satu kelebihan dari Program GP3K yang diterapkan oleh petani mitra khususnya di Desa Tulungrejo adalah mutu sarana produksi pertanian (saprodi) dari PT. Pertani (Persero) yang berkualitas tinggi sehingga dapat menambah jumlah hasil panen secara signifikan menjadi lebih dari 5 ton per hektare, hal tersebut tidak terlepas dari penerapan seluruh paket saprodi yang telah diterapkan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Dengan penerapan produk berkualitas dari PT. Pertani (Persero) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian petani di Desa Tulungrejo, selain itu juga menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dari petani peserta program kemitraan dalam jumlah dan waktu yang tepat, hal tersebut dikarenakan produk tersebut didistribusikan langsung oleh PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang ke petani mitra di Desa Tulungrejo.

b. Faktor Penghambat

Kendala-kendala pokok yang dihadapi oleh petani mitra dalam pola kemitraan yang dilaksanakan yaitu:

1) Faktor Alam

Produktifitas pertanian di Desa Tulungrejo bisa dikatakan belum maksimal karena kondisi sebagian besar lahan pertanian berada di lereng perbukitan dan dataran tinggi sehingga menyulitkan proses irigasi, serta kondisi kesuburan tanah di Desa Tulungrejo masih di bawah Desa-desanya lain di Kecamatan Ngantang terutama yang berada di sekitar wilayah waduk Selorejo. Selain masalah irigasi, faktor kesuburan tanah juga cukup mempengaruhi walaupun tidak dominan. Produktifitas pertanian di Tulungrejo terhambat oleh faktor alam seperti kondisi geografis dan sistem irigasi, terlebih setelah erupsi gunung kelud pada 13 Februari 2014. Namun dari hasil penelitian di lapangan, kondisi tersebut dapat diminimalisir melalui implementasi Program GP3K, karena sarana produksi (saprodi) yang di aplikasikan petani benar-benar bermutu tinggi dan sudah dijamin oleh pemerintah serta di pantau langsung oleh petugas lapangan (*spot worker*) dari PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang dalam pengaplikasian produk dari proses tanam hingga panen.

2) Nilai jual dibawah standar pemerintah

Di Desa Tulungrejo, nilai jual produk pertanian dari petani bisa dibilang masih rendah, karena hampir seluruh petani di Desa Tulungrejo menjual hasil panen langsung ke pengepul yang menawarkan harga gabah dibawah standar dari ketetapan pemerintah. Permasalahan penjual hasil pertanian yang masih di kuasai pengepul atau tengkulak memang menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, pasalnya petani di seluruh Indonesia sudah seharusnya mendapat jaminan ketika panen tiba, karena sudah diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Bahkan dalam sistem kemitraan GP3K yang dicanagkan Kementrian BUMN sektor pertanian, masalah penjualan hasil panen juga sudah diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara BUMN pelaksana dengan petani mitranya, artinya BUMN pelaksana, dalam hal ini PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang seharusnya juga terlibat dalam hal pembelian hasil panen petani mitranya, untuk kemudian di tampung ke gudang-gudang perusahaan PT. Pertani. Namun, hal ini belum dapat terealisasi karena, PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang tidak memiliki fasilitas gudang yang mencukupi, dari hasil pantauan di lapangan, peneliti mendapatkan bahwa PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang hanya memiliki tiga buah gudang, itupun yang digunakan hanya satu sebagai tempat penyimpanan dan pengemasan produk sarana produksi (saprodi) PT. Pertani (Persero), sedangkan sisanya disewakan kepada pihak lain.

3) Kurangnya Jumlah petugas lapang / *Spot Worker*

Jumlah petugas lapang / *Spot Worker* dari PT. Pertani (Persero) yang sangat minim sedangkan tuntutan target mendapatkan luasan lahan yang besar membuat *Spot Worker* kurang maksimal dalam menangani sebuah lokasi, selain itu jumlah dan peran petugas penyuluh lapang setempat sebagai jembatan informasi kepada petani juga masih kurang maksimal. Salah satu kewajiban PT. Pertani (Persero) dalam menjalankan program korporasi GP3K dengan petani mitranya adalah dengan melakukan sosialisasi secara rutin dan berkala dalam memantau proses usaha tani yang dilakukan petani mulai dari awal penanaman hingga panen, proses sosialisasi tersebut dimaksudkan agar petani dapat mengaplikasikan saprodi pertanian PT. Pertani (Persero) secara benar, serta menjalankan usaha taniya dengan baik agar diperoleh hasil yang maksimal. Namun seiring dengan semakin bertambahnya petani yang bermitra dengan PT. Pertani, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, area tugas *spot worker* (petugas lapangan) dari PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang juga semakin bertambah, sedangkan jumlah petugasnya tetap, hal tersebut tentu mempengaruhi kualitas pelayanan kepada petani mitra. Secara umum kinerja petugas lapangan (*spot worker*) PT. Pertani (Persero) belum maksimal terutama dalam hal pengawasan atau sosialisasi langsung kepada petani mitra, hal tersebut dikarenakan jumlah petugas *spot worker* yang masih

terbatas sementara harus mengawasi wilayah area pemasaran PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang yang sangat luas.

4) Faktor ekonomi;

Dalam mekanisme Pembiayaan atau Permodalan Program GP3K, diketahui bahwa sumber pembiayaan untuk kegiatan budidaya (*on farm*) berasal dari program KKP-E. Program KKP-E sendiri merupakan kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui kelompok tani atau koperasi primer baik untuk kegiatan budidaya tanaman maupun pengadaan. Waktu pengambilan pinjaman kredit beserta bunganya sering terhambat karena petani mempunyai sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga terpaksa menggunakan dana pengembalian pinjaman, selain itu pengembalian kredit terkadang juga terhambat karena adanya serangan hama maupun bencana seperti erupsi gunung kelud yang melanda Desa Tulungrejo sehingga ada keterlambatan pelunasan kredit. Untuk mengatasi hal yang tidak terduga seperti gangguan hama dan bencana alam seperti kasus di Desa Tulungrejo ini, PT. Pertani (Persero) memang sudah menetapkan ketentuan seperti yang tercantum dalam Prosedur Program GP3K, dimana tertulis bahwa apabila pada saat proses hingga panen produksi mengalami gangguan hama dan penyakit atau faktor alam lainnya, maka pelunasan pinjaman bisa dilunasi pada saat panen musim berikutnya dengan catatan ada foto dokumentasi dan berita acara dari PPL/PHT/Mantri Tani/Dinas terkait.



BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan, studi tentang sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Pertanian (GP3K), maka dapat dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan sebagai berikut:

1. Sinergi PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang terkait program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K), yang meliputi:

b. Bentuk Sinergi;

Sinergi yang terjalin antara PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan suatu sinergi yang berbentuk program kemitraan, yakni Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Program kemitraan GP3K merupakan kegiatan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kelompok tani binaan dalam rangka peningkatan produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui penerapan Program GP3K, petani di Desa Tulungrejo diharapkan mampu mengembangkan usaha taninya demi

terwujudnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani seperti yang diharapkan.

b. Peran Aktor Pelaksanaan;

Sistem kemitraan GP3K antara PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang dan petani mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang termasuk dalam Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA) dimana terdapat hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Setiap aktor yang bermitra memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, dimana kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan pihak perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian.

c. Implementasi Program;

Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang merupakan wilayah yang sebagian besar petaniya melakukan usaha pertanian untuk memperoleh pendapatan dalam upaya memenuhi kebutuhanya melalui Program Kemitraan GP3K, dari hasil survey diketahui bahwa kelompok tani yang aktif dan menjadi pelopor Program GP3K di Desa Tulungrejo adalah Kelompok Tani Rukun Makmur III di Dusun Gagar. Petani Rukun Makmur III di Desa Tulungrejo memperoleh hasil yang positif dari kerjasama kemitraan GP3K, hal tersebut dikarenakan program kemitraan GP3K berpeluang untuk meningkatkan produksi hasil panen tanaman pangan petani dengan memberikan pinjaman modal berbunga rendah bagi petani berupa paket sarana produksi (saprodi) pertanian berkualitas dari PT. Pertani (Persero).

d. *Output* Sinergi;

Pelaksanaan Kemitraan yang dilaksanakan antara PT Pertani (Persero) dengan petani mitra pada dasarnya merupakan proyek sosial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi semua aktor yang terlibat yaitu PT. Pertani (Persero) maupun bagi petani mitra itu sendiri. PT. Pertani (Persero) melakukan kemitraan dengan tujuan untuk memasarkan produk dari perusahaan dengan melakukan program kemitraan. Sedangkan petani mengadakan kemitraan karena membutuhkan sarana produksi yang disediakan oleh PT. Pertani. Oleh karena itu kedua belah pihak memiliki tanggung jawab

masing-masing agar kerjasama dapat berjalan dengan lancar, sehingga output yang dihasilkan tentu akan menguntungkan pihak yang beritra.

2. Faktor pendukung dan penghambat dari sinergi antara PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang terkait program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K), yang meliputi:

- a. Faktor Pendukung;

Meliputi Sarana dan Prasarana yang menunjang, seperti berada disekitar basis bisnis PT Pertani Cabang Pemasaran Malang, kondisi lahan cukup bagus, lokasi mudah terjangkau oleh transportasi. Selain itu juga program sinergi kemitraan ini merupakan program berkelanjutan sehingga menguntungkan petani untuk perencanaan jangka panjang, kemudian pembiayaan kredit berbunga rendah yaitu hanya 6% per tahun, dan penerapan sarana produksi pertanian yang berkualitas sehingga meningkatkan jumlah produksi petani yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.

- b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program kemitraan antara PT. Pertani (Persero) dan petani mitra di Desa Tulungrejo, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program kemitraan tersebut, yakni faktor alam seperti bencana alam dan serangan hama, kesulitan petani untuk membayar kredit karena masalah ekonomi, keberadaan tengkulak yang membeli gabah petani dibawah

standar pemerintah, kurangnya infrastruktur gudang PT. Pertani Malang sehingga tidak dapat menampung hasil panen petani mitra, hingga kurangnya jumlah *spot worker* atau petugas penyuluh lapangan PT. Pertani (Persero) sehingga proses pendampingan dan sosialisasi kepada petani menjadi kurang maksimal

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan serta berbagai faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan GP3K antara PT. Pertani (Perser) dan petani mitra di Desa Tulungrejo, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menambah jumlah *spot worker* atau petugas lapangan PT. Pertani (Persero) agar sebanding dengan jumlah petani mitra serta luas lahan pertanian agar sosialisasi program dan proses pendampingan terhadap petani khususnya di Desa Tulungrejo menjadi lebih maksimal. Selain itu, akan lebih baik jika dalam proses pendampingan *spot worker* bekerjasama dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Dinas Pertanian setempat agar hasil yang didapat lebih maksimal.
2. Manajemen keuangan petani harus lebih ditingkatkan lagi, artinya petani harus pintar-pintar mengelola keuangan dengan mementingkan kebutuhan primer serta persiapan masa tanam berikutnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar waktu pengambilan pinjaman kredit beserta bunganya tidak lagi terhambat. Selain itu petani juga diharapkan mampu menjual hasil panen dengan harga tinggi di pasaran dan tidak selalu bergantung kepada pengepul.

3. Penambahan infrastruktur perusahaan, khususnya gudang milik PT. Pertani (Persero) Cabang Pemasaran Malang agar bisa digunakan untuk menampung hasil panen petani mitra. Hal tersebut perlu dilakukan agar Program GP3K berjalan sebagaimana seharusnya, artinya pihak pemerintah melalui BUMN PT. Pertani (Persero) membeli langsung hasil panen petani mitranya. Selain itu pemerintah juga seharusnya mampu menjamin harga gabah petani agar tidak merugikan petani.
4. Peningkatan pengawasan dan sosialisasi langsung kepada petani melalui Dinas Pertanian serta aparaturnya pemerintah setempat agar setiap masalah yang dihadapi petani dapat langsung terselesaikan, seperti contohnya pada kasus erupsi Gunung Kelud pada tanggal 13 Februari 2014 lalu, fakta dilapangan menunjukkan bahwa di Desa Tulungrejo masih banyak terdapat masalah yang ditimbulkan seperti rusaknya sumber aliran irigasi, kerusakan pada tanaman, lahan pertanian dsb, hal tersebut tentu dapat menambah beban petani.
5. Selalu meningkatkan kualitas sinergi kemitraan yang terjalin antara pemerintah baik melalui PPL Dinas Pertanian, aparaturnya terkait, petani mitra dan PT. Pertani (Persero), diantaranya melalui komunikasi yang intensif, peningkatan kerjasama yang dilakukan, selalau menjaga kepercayaan, dalam hal ini petani mitra di Desa Tulungrejo maupun PT Pertani (Persero) Malang harus percaya bahwa mitra mereka akan menjalankan kewajibannya dan melakukan yang terbaik demi hubungan kemitraan, selain itu juga selalu menjaga komitmen yang telah disepakati bersama agar Program Kemitraan GP3K ini terus berlanjut dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. "Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Tetap)". *Berita Resmi Statistik*, No. 90/12/Th. XVI, 2 Desember 2013.
- Badan Pusat Statistik. 2013. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2013". *Berita Resmi Statistik*, No. 47/07/Th. XVI, 1 Juli 2013.
- Darmawan, Agung. 2012. *GP3K, Solusi Ketahanan Badan Pangan Nasional* (Rega Indra Adhiprana). *Stomata*, No.2, hal 22-23, November 2012.
- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintah Desa Berbasis Good Governance*. Malang: Sekertariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) FEUB.
- Djajanto, Pandu. 2011. "BUMN Motor Ketahanan Pangan". *Buletin GP3K*, No.3, hal 9, Oktober-November 2011.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya press.
- <http://desatulungrejo.wordpress.com/profil-desa-tulungrejo-2/> diakses tanggal 30 Oktober 2013
- <http://www.malangkab.go.id/konten-85.html> diakses tanggal 20 Maret 2014
- Iqbal, M. Dan T. Sudaryanto. 2008. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Prespektif Kebijakan Pembangunan Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 6 No. 2, Juni 2008: 155-173.
- Keputusan Mentri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.
- Luthfi, Muchtar. 2013. *Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan/SPBN Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Kota Jepara, Kabupaten Jepara)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan
- Mardikanto, Totok. 1994. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. Surakarta: UNS Press.

- Marsiatanti, Dyah Yusi. 2011. *Sinergi Antara Pemerintah dan masyarakat dalam Melestarikan Kesenian Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dalam Melestarikan Topeng Malangan)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Maulidiah, Fadila. *Perkembangan Kemitraan Petani Tebu dengan PG. Krebet Baru: Perilaku Ekonomi Petani Tebu*. Jurnal online Universitas Negeri Malang. <http://jurnal-online.um.ac.id> diakses pada tanggal 20 April 2014
- Moleong, J Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perturan Menteri BUMN No.Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk.
- Prasticha, Mey. 2013. *Analisis Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi) dan Non GP3K (Studi Kasus di Dusun Sekar Putih, Desa Pandem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)*. Universitas Brawijaya, Malang: Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Poerwandari,E .K. 1998. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta : Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI.
- Saptana dan Ashari. 2007. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha*. Jurnal Litbang Pertanian, 26(4).
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Admninstrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: CV. Sofa Mandiri.

- Soekartawi. 1995. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, Lukman. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, AT. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryana, Achmad. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Undang Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jakarta: Sekretariat Negara.

LAMPIRAN 1

INTERVIEW GUIDE

1. Bagaimana tanggapan petani mitra di Desa Tulungrejo terkait program kemitraan GP3K yang diterapkan PT. Pertani (Persero)?
2. Bagaimana dengan peran dan kontribusi PT. Pertani dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program kemitraan GP3K di Desa Tulungrejo?
3. Apakah petani sudah cukup puas dengan sistem kemitraan yang terjalin dengan PT. Pertani?
4. Bagaimana dengan peran pemerintah Desa Tulungrejo sendiri dalam menjebatani sinergi antara PT. Pertani dan Petani Mitra terkait implementasi Program GP3K?
5. Bagaimana pula dengan peran lembaga desa seperti KUD, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan lembaga sosial desa lainnya terkait dengan sinergi tersebut?
6. Apakah sinergi tersebut telah memberi dampak yang signifikan terhadap kemajuan sektor pertanian di wilayah Desa Tulungrejo?
7. Adakah hambatan atau kesulitan bagi Petani Mitra di Desa Tulungrejo terkait dengan sinergi tersebut?
8. Apa harapan kedepannya bagi Petani Mitra di Desa Tulungrejo terkait dengan sinergi GP3K ini?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI TERKAIT PENELITIAN YANG DILAKUKAN



Gambar 1. Area Pertanian Kelompok Tani Rukun Makmur III Desa Tulungrejo



Gambar 2. Penerapan Saprodi PT. Pertani (Persero) di Desa Tulungrejo



Gambar 3. Lokasi Penelitian di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang



Gambar 4. Lokasi Penelitian di Kantor Kecamatan Ngantang



Gambar 5. Lokasi Penelitian di BUMN PT. Pertani (Persero) Malang



Gambar 6. Narasumber Riset Ketua Kelompok Tani Rukun Makmur III Bp. Wardi



Gambar 7. Narasumber Riset Kaur Umum Ds. Tulungrejo Bp. Imam



Gambar 8. Narasumber Riset Aparatur Desa Tulungrejo



Gambar 9. Gudang PT. Pertanian (Persero) Malang

LAMPIRAN 3

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
 MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 540 /421.205/2014

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB Malang No: 4104/UN
 10.3/PG/2014 Tanggal: 24 Maret 2014 Perihal: Ijin Riset

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Ijin Riset** oleh :

Nama / Instansi : Redy Puja Kesuma /Mhs. Fakultas Ilmu Administrasi UB
 Malang
 Alamat : Jln. MT Haryono 163 Malang
 Thema/Judul/Survey/Research : Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan
 Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada
 Sinergi PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra di Desa
 Tulungrejo Kec. Ngantang Kab. Malang
 Daerah/tempat kegiatan : Desa Tulungrejo Kec. Ngantang Kab. Malang
 Lamanya : 2 Bulan
 Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
 Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 26 Maret 2014

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MALANG**
 Sekretaris

Drs. ADI KARYANTO, M.Pd

Pembina TK I

NIP : 19590731 198103 1 006

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB Malang
2. Sdr. Camat Ngantang Kab. Malang
3. Sdr. Kepala Desa Tulungrejo Kec. Ngantang Kab. Malang
4. Sdr. Mhs/Ybs
5. Arsip

LAMPIRAN 4**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN NGANTANG
DESA TULUNGREJO

Jln: Panglima Sudirman No.18 Kode Pos 6539

SURAT KETERANGAN

Nomor: 072/04/421.603.006/2014

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MULIADI SP.d
Jabatan : Kepala Desa Tulungrejo
Alamat Kantor : Jln : Panglima Sudirman No 18 Desa Tulungrejo

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : REDI PUJA KESUMA
NIM : 105030100111073
Jurusan : Administrasi Publik
Alamat : Jln. MT.Haryono No. 109 Malang

Nama tersebut di atas benar-benar selesai melaksanakan Riset/ Survey di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang , terhitung mulai 24 Maret 2014 sampai dengan 21 April 2014 dengan Judul “ Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Sinergi PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tulungrejo, 22 April 2014

Kepala Desa

MULIADI SP.d



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN NGANTANG**

Jl. Raya Ngantang Nomor 68 Telpn (0341) 521155
NGANTANG 65392

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 85 /421.603/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. MULYONO HS
Jabatan : Camat Ngantang
Alamat Kantor : Jl. Raya Ngantang no. 68 Kecamatan Ngantang
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
N a m a : REDI PUJA KESUMA
NIM : 105030100111073
Jurusan : Administrasi Publik
Alamat : JL. MT. Haryono No. 109 Malang

Nama tersebut di atas benar – benar telah selesai melaksanakan Riset/ Survey di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, terhitung mulai 24 Maret 2014 sampai dengan 21 April 2014 dengan Judul " Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Sinergi PT. Pertani (Persero) dan Petani Mitra)".

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. CAMAT NGANTANG

KASI KESOS DAN KP



SUGIYO

NIR 19840814 198602 1 006



GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN berbasis KORPORASI (GP3K)

PERAN BUMN DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011



KEUNTUNGAN mengikuti program GP3K

- ==> YARNEN (Bayar panen)
- ==> Produksi pangan meningkat
- ==> Persyaratan mudah
- ==> Bunga pinjaman ringan
- ==> Produk yang ramah lingkungan
- ==> Benih unggul bersertifikat
- ==> Tanpa biaya administrasi
- ==> Program Berkelanjutan

BUNGA
0,5%
PER
BULAN

RENCANA PAKET SARANA PRODUKSI KEMITRAAN PER Ha.

P A D I

Paket	No	Sarana Produksi	Harga	Kwantum	Satuan	Rupiah
Produk	1.	Benih Padi SS Dua Kuda	11.000	30	Kg	330.000
	2.	Biorganik*	1.750	400	Kg	875.000
	3.	P O C*	50.000	6	Ltr	200.000
	4.	NEB STRONG UP*	30.000	8	Btl	240.000
	5.	Procals*	8.000	100	Kg	800.000
Uang Tunai	6.	UREA Subsidi	1.800	200	Kg	360.000
	7.	NPK Subsidi	2.300	100	Kg	230.000
	8.	Biaya Garap	1.500.000	1	Rp	1.500.000
Sub Total						4.535.000
Bunga Bank 0,5% per bulan			22.675	5	Bln	113.375

TOTAL PINJAMAN PER HEKTAR

4.633.375

ALUR/CARA
PENGAJUAN

Foto kopi KK & KTP yang masih berlaku
Disertai Luas lahan yang diajukan
Kumpulkan di Gapoktan / Kelompok tani

CATATAN :

- ==> Modal berupa uang tunai dan produk PT Pertani (PERSERO)
- ==> Uang Tunai penggantian biaya garap, penggantian pembelian pupuk kimia, penggantian pembelian pestisida akan **dicairkan setelah** semua sarana produksi (Benih, POC, NEB, Biorganik, Procals) sudah diterima oleh petani mitra dan sudah diverifikasi oleh BRI.
- ==> Jika pada saat proses hingga panen produksi mengalami gangguan hama tikus atau faktor alam lainnya, maka pelunasan pinjaman bisa dilunasi pada saat panen musim berikutnya **dengan catatan ada foto dokumentasi dan berita acara dari PPL/PHT/Mantri Tani.**

Contact Person

ALUR PENGAJUAN GP3K

Foto kopi
KTP & KK
Petani

Ketua
Kelompok
Tani

 **Pertani**
PT. PERTANI (PERSERO)
CABANG PEMASARAN MALANG

PREVIEW PRODUCTS PT. PERTANI (PERSERO)



**MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI
MENEKAN APLIKASI PUPIK UREA HINGGA 50%
MENGATASI KELANGKAAN PUPIK (NITROGEN)**

Cara penggunaan NEB "Strong Up" dicampur dengan 50% pupuk kimia (50 Kg=2 btl) yang biasa digunakan petani (Urea/NPK/ZA/Ponska). NEB juga bisa diaplikasikan waktu persemaian.



BIORGANIK - BINTANG KUDA LAUT **Pupuk Organik Granul (P O G)**

PUPIK DASAR penyubur/pembenah tanah berbentuk butiran dengan dosis (500 Kg/1 Ha) Mengandung Unsur Hara Makro (N, P, K, S, Mg dan Ca), Unsur Hara Mikro (Mn, Cu, Bo, Zn, Cl, dll), Hormon tumbuh/ZPT, Organik Hayati dan Efektif Mikroorganisme. Mampu meningkatkan produktifitas lahan & ramah lingkungan.

PUPIK ORGANIK CAIR (POC) - BINTANG KUDA LAUT

Memacu pertumbuhan optimum tanaman; Mengandung berbagai jenis mikro-organisme penyubur tanah; Meningkatkan kualitas hasil panen; Melindungi tanaman dari serangan penyakit

Penggunaan bisa disemprot atau dikocor secara merata dengan interval setiap 7-10 HST dengan dosis 70 cc/14 ltr sampai tanaman bunting (fase generatif)



PROCALS - BINTANG KUDA LAUT

Menyehatkan akar dan memberikan nutrisi tanaman
Menaikan pH tanah yang asam sehingga menjadi netral

Untuk lahan asam ditaburkan merata 2-3 Kw per Ha kemudian diairi, 1X aplikasi.

Untuk perawatan disemprotkan pada tanaman 1-2 gr/L, dengan aplikasi 1X dalam seminggu.

 **Pertani**
Sahabat Setia Petani

BENIH

SS

CIHERANG DK
SITUBAGENDIT SS
WAY APO BURU SS
SIDENUK SS

CIBOGO DK
INPARI SS
MEKONGGA SS
IR-64 DK

CURRICULUM VITAE

Nama : Redy Puja Kesuma
NIM : 105030100111073
TTL : Jambi, 26 September 1992

A. Pendidikan Formal :

1. SDN 159/v Tanjung Jabung Barat, Tamat tahun 2004
2. SMPN 17 Kota Jambi , Tamat tahun 2007
3. SMAN 5 Kota Jambi, Tamat tahun 2010
4. Program S1 FIA Publik Univ. Brawijaya Malang, Tamat tahun 2014

B. Pengalaman Organisasi :

Pengurus Bidang Internal, Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS (Tegazs) Universitas Brawijaya
Periode : 2013 – 2014

C. Publikasi Karya Ilmiah :

Judul Karya Tulis Ilmiah : Kemitraan Pemerintah Swasta dan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kemitraan PT. Pertani (Pesero) dan Petani Mitra di Desa Tulungrejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)

